

Pendidikan Karakter dan Perilaku Memilih Warga Kota Sungai Penuh

Jafar Ahmad

IAIN Kerinci

kuojafar@gmail.com

Abstrak

Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, keterlibatan langsung warga dalam setiap pemilihan politik telah membawa perubahan besar. Tidak saja bagi meningkatnya partisipasi warga secara langsung dalam politik, namun juga beberapa eksekutif negatif terhadap perilaku memilih warga. Di antara yang paling menonjol adalah pola pilihan yang sangat dipengaruhi oleh unsur primordialisme dan penggunaan uang sebagai imbalan dalam pemilihan. Perilaku politik warga dalam melakukan pilihan seperti yang tersebut di atas, alih-alih mendukung berkembangnya demokrasi ke arah yang lebih baik, justru menghancurkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh demokrasi. Sehingga perlu upaya yang cukup serius untuk mengantisipasi berkembangnya perilaku politik yang telah berkembang, paling tidak sejak proses pemilihan langsung, tahun 2004, dimulai. Namun, di tengah-tengah masalah yang ditemui di atas, tetap ada peluang bagi pihak yang ingin memperbaiki kualitas perilaku memilih warga. Responden meyakini bahwa himbuan para tokoh masyarakat di masing-masing daerah tetap bisa memberi pengaruh positif bagi perilaku memilih warga. Bahkan, media komunikasi melalui tempat-tempat ibadah dan acara-acara keagamaan dianggap efektif untuk memperbaiki perilaku memilih warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

PENDAHULUAN

Masa Reformasi sebagai penanda runtuhnya kekuasaan Soeharto yang dibangun selama 32 tahun pada tahun 1998 dalam waktu bersamaan juga menandakan runtuhnya sistem politik otoriter yang terbangun melalui usaha sadar dalam rentang waktu 1966 – 1998 tersebut. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan beberapa konsekuensi turunan bagi sistem pemerintahan, misalnya krisis kepercayaan kepada lembaga politik, penyelenggara negara, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Runtuhnya rezim Soeharto juga membawa perubahan mendasar lainnya dalam sistem politik Indonesia. Tekanan publik terhadap pemerintah otoriter yang dipraktikkan Soeharto pada masa akhir

kepemimpinannya, yakni sekitar tahun 1997 akhir, menunjukkan pergerakan yang cukup besar. Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan, organisasi masyarakat, intelektual, dan media massa secara bersama-sama meminta Soeharto mundur dari kursi kekuasaan. Dalam perkembangannya kemudian, Soeharto memilih mundur dari kursi presiden, meletakkan jabatannya. Sistem otoriter itupun berangsur berubah menuju sistem politik transisional.ⁱ

Sejauh ini, era dimaksud disebut sebagai Era Reformasi yang dimulai dengan kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 tersebut, ditandai dengan kebebasan untuk bersikap dan mengemukakan pendapat secara terbuka, termasuk dalam hal mendirikan partai politik.ⁱⁱ Usaha Pemerintah Orde Baru menegakkan dominasi politik dengan berbagai upaya tidak bisa lagi menopang kekuasaan. Selama 32 tahun Orde Baru telah membangun persepsi, kesadaran, dan penerimaan publik akan rezim yang ada. Pemerintah Orde Baru telah membentuk persepsi dengan pembentukan opini melalui aneka institusi dengan mekanisme kekerasan simbolik berupa aneka bentuk kekuasaan.ⁱⁱⁱ Sebagai usaha untuk lepas dari tradisi pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik, pada tahun 2004, melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Masa reformasi, selain ditandai dengan mulai munculnya keberanian dalam mengeluarkan pendapat berbeda terhadap pemerintah, juga di sisi lain memunculkan upaya untuk menemukan pemimpin daerah yang berasal dari kalangan internal daerah itu sendiri. Maksudnya, seorang kepala daerah seperti gubernur dan bupati harusnya dari penduduk asli. Masing-masing daerah mulai memikirkan dengan serius siapa saja yang pantas menjadi pemimpin di daerah mereka.

Gerry Van Klinken, seorang periset yang banyak meneliti di Indonesia, Australia, dan Belanda, yang tulisan mutakhirnya tentang konflik etnis yang terjadi di luar Jawa pasca-Orde Baru, menyebutkan dalam salah satu artikelnya *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal*, bahwa telah terjadi peningkatan keterlibatan etnik lokal untuk kembali muncul sebagai simbol etnik yang pernah berkuasa di wilayahnya dulu. Maka bermunculanlah keturunan para raja/ sultan, mulai dari Sumatera sampai Maluku. Masa transisi ini ditandai dengan pemberian hak kepada daerah untuk lebih leluasa dalam mengambil kebijakan dibandingkan dengan era Orde Baru. Upaya

kembalinya elit lokal untuk menguasai wilayahnya bisa ditemukan di Sulawesi Tengah, Sumba Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.^{iv}

Dari penelitian pada era reformasi kelihatan ada upaya yang sangat kuat dari masing-masing tokoh masyarakat daerah untuk mendapatkan pemimpin dari lingkungan sosial dan etnik mereka sendiri. Upaya untuk mengembalikan identitas etnik terlihat jelas di beberapa daerah, misalnya muncul lagi beberapa tokoh yang diakui/ mengaku sebagai keturunan raja atau sultan pada beberapa daerah. Hal ini juga berlaku dalam pemilihan umum yang memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Nilai-nilai primordialisme muncul dan terlihat begitu nyata dalam proses politik yang berlangsung sepanjang masa reformasi sampai hari ini. Dalam Perspektif Pierre Felix Bourdieu, sosiolog Prancis, menyebutkan bahwa setiap kelompok, dalam hal ini etnik, pasti memiliki upaya untuk mempertahankan kepentingan sendiri dengan berbagai cara. Paling tidak ada lima cara dalam melanggengkan kepentingan dalam perspektif Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa manusia dan kelompoknya memiliki habitus yang telah terbentuk dalam jangka panjang. Habitus adalah seperangkat kebiasaan yang telah tertanam secara mendalam dalam diri seseorang dari pengalaman yang ia terima sedari awal. Dalam rangka mempertahankan habitus masing-masing, para aktor melakukan beberapa strategi. Menurut Bourdieu, terdapat lima strategi yang dapat dilakukan seseorang, yaitu (1) *Strategi investasi biologis* berhubungan dengan usaha pelestarian keturunan dan terjaminnya transmisi kapital pada generasi berikutnya. (2) *Strategi suksesif* berhubungan dengan usaha untuk menjamin pengalihan (*transmission*) harta warisan antar generasi dengan cara yang seefektif mungkin. (3) *Strategi investasi ekonomi* berkaitan dengan pengalihan kapital ekonomi, tujuannya adalah mempertahankan dan meningkatkan akumulasi kapital yang dimiliki. (4) *Strategi edukatif* merupakan usaha suatu kelompok sosial untuk menciptakan pelaku-pelaku sosial baru yang layak dan mampu menerima warisan dari kelompok sosial tersebut. (5) *Strategi investasi simbolik* terkait dengan semua tindakan yang melestarikan dan meningkatkan kapital simbolik: pengakuan atau kehormatan dengan tujuan mereproduksi persepsi dan apresiasi yang paling sesuai demi terjaminnya legitimasi posisi mereka di dalam hirarki sosial.^v

Era reformasi yang berlangsung sejak 1998 belum sepenuhnya mampu menanamkan kepercayaan publik atas segala hal, terutama dalam hal politik. Keinginan untuk kembali ke masa lalu, dengan kehidupan politik yang lebih tenang, masih kadang-kadang terdengar dalam perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan politik (kadang-kadang disebut juga *institutional trust*) mengacu pada perasaan masyarakat 4egara mempunyai kepercayaan kepada institusi politik. Dengan demikian, kepercayaan dapat dilihat sebagai suatu bentuk dukungan tersebar bagi 4egara dari warga 4egara. Dalam hal ini, penting untuk membedakan berbagai tingkatan objek kepercayaan politik. Pertama, kepercayaan politik dapat merujuk pada perilaku politisi tertentu, khususnya yang sedang memegang kekuasaan. Tak mengherankan jenis kepercayaan ini paling mudah berubah, dan berakitan dengan kinerja politisi dalam kekuasaan, 4egara politik pada umumnya, dan ekonomi 4egara. Fluktuasi pada tingkatan kepercayaan terhadap politisi tertentu, biasanya tidak dilihat sebagai 4egara4atic, apabila politisi inkumben dapat diganti.^{vi} Tingkatan yang kedua mengacu kepada kepercayaan terhadap institusi itu sendiri, seperti parlemen, pemerintah, atau pengadilan. Di sini asumsinya adalah bahwa kepercayaan terhadap institusi ini sangat penting bagi stabilitas 4egara. Bahkan jika warga 4egara tidak setuju dengan kebijakan yang sedang dijalankan partai atau partai-partai pemerintah, mereka dapat mengekspresikan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Penelitian survey menunjukkan bahwa kepercayaan kepada institusi adalah jauh lebih stabil daripada kepada politisi tertentu. Ketiga, dan jauh lebih abstrak, adalah kepercayaan kepada prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan politik, seperti kepercayaan kepada demokrasi. Pada sebagian besar masyarakat Barat, tingkat kepercayaan ini tetap tinggi dan stabil.^{vii}

Nilai-nilai demokrasi yang membutuhkan peran serta warga dalam politik merupakan salah satu pra-syarat dalam terbentuknya masyarakat demokrasi yang lebih mandiri dan maju. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perilaku politik masyarakat saat ini, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberi gambaran utuh mengenai perilaku politik yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di samping itu, penelitian politik ini akan dilengkapi dengan pembahasan dari perspektif dakwah. Dalam konteks ini

perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi politik yang digunakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, yaitu:

“Politik adalah hal memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.” Internal politik adalah “mengurus persolalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan, dan dikeritik jika mereka melakukan kekeliruan.” Sedang yang dimaksud dengan eksternal politik adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.”^{viii}

Dengan pemahaman definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa politik dan dakwah adalah dua kegiatan yang sangat terkait, dan sangat mungkin dakwah menjadi kegiatan politik, atau politik menjadi kegiatan dakwah, atau dapat disebut *two in one*. Bahwa dakwah adalah politik apabila ia berperan memahamkan masyarakat kepada hak dan kewajiban mereka. Dan bahwa politik adalah dakwah jika ia berperan mengajak masyarakat berbuat baik, memfasilitasi mereka berbuat makruf dan menutup semua pintu bagi masyarakat untuk berbuat zhalim dan dizhalimi.

Secara operasional, bahwa dakwah adalah politik dan politik adalah dakwah dapat dipahami dengan baik oleh setiap muslim apabila *pertama*, memahami universalitas Islam; *kedua*, memahami risalah penciptaan manusia; dan *ketiga*, mengetahui cara merealisasikan risalah tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga setiap muslim harus menjadi da'i sekaligus menjadi politisi. Karena itulah Hasan Al Banna mengatakan:

“Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politisi, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya.”^{ix}

Dengan demikian, perpaduan antara demokrasi langsung yang ditandai dengan pemilihan langsung oleh warga dalam setiap kontestasi bidang politik dengan urgensi dakwah Islam sebagai pendampingnya menjadi suatu bahasan yang penting untuk memastikan bahwa demokrasi itu berjalan, tidak hanya sesuai dengan norma politis, namun juga selaras dengan norma Islam.

Apa yang menjadi sumber perilaku memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh?; Bagaimana bentuk perilaku memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh?; Apa yang bisa mengubah perilaku memilih ke arah yang lebih baik?; Bagaimana dakwah Islam bisa menjadi solusi bagi perbaikan perilaku memilih warga?

Kerangka Teori

1. Otonomi Daerah dan Politik Lokal

Selama Orde Baru, asas sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai ciri dari negara kesatuan, telah mematikan demokrasi di tingkat lokal khususnya rekrutmen kepemimpinan politik lokal. Padahal menurut Benyamin Husain pembentukan desentralisasi dan pemberian kekuasaan daerah adalah untuk kepentingan masyarakat setempat. Sementara kenyataan yang menonjol adalah daerah otonom bukan saja diciptakan sekaligus subordinasi Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga merupakan perpanjangan kekuasaan Pemerintah Nasional yang berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan. Sebaliknya, desentralisasi tetap diupayakan untuk mengurangi berbagai masalah dan ketegangan yang timbul dari implementasi asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi menurut B.C Smith adalah:

"...an approaching process to local government provided that there is a delegation of authority to subordinate government and power-sharing government to the regions, this can be seen as a strategy to reduce centralization of power in addition to increasing the democratization of local politics".^x

(....suatu proses pendekatan terhadap pemerintah daerah, dengan syarat yang mendelegasikan kekuasaan kepada Pemerintah (daerah) sebagai subordinasi pemerintah pusat dan pembagian kekuasaan kepada daerah, hal ini dapat dilihat sebagai strategi untuk memperkecil ruang sentralisasi kekuasaan disamping untuk mendorong kemajuan demokratisasi politik lokal.)

Berbagai peraturan telah dibuat untuk memberikan berbagai wewenang kepada daerah melalui desentralisasi dengan maksud untuk mengurangi dominasi pemerintah dan elit politik Pusat. Kewenangan itu untuk memperkuat fungsi dan peran infra-struktur politik dan suprastruktur politik lokal, seperti eksekutif daerah (gubernur-walikota-bupati), legislatif daerah (DPRD), partai politik, kelompok kepentingan (*interest group*), media massa dan elit politik seperti dalam

rekrutmen kepemimpinan politik lokal. Sebab, salah satu dasar historisnya adalah munculnya berbagai masalah dalam hubungan pusat-daerah berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan politik lokal.

Penegasan terhadap munculnya berbagai masalah hubungan pusat-daerah sebagaimana dapat dicermati dari penjelasan Denis A. Rondinelli. Menurut Rondinelli, politik sentralistik lebih membawa pada kondisi yang anti (kurang) demokrasi.^{xi} Rondinelli dalam bukunya *Decentralization, Development and Directions*, menjelaskan :

“The Low levels of political support at the center in most Third World countries have also undermined decentralization policies”^{xii}

(Lemahnya tingkat *dukungan* politik pemerintah pusat (negara) pada kebanyakan negara dunia ketiga juga melemahkan politik desentralisasi)

Kondisi ini juga sebagaimana dijelaskan oleh John Stewart dalam artikel *Democracy and Local Government* yang menekankan proses demokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal sangat penting untuk menanggulangi persoalan mengenai terlalu kuatnya sentralisasi dan menjaga demokrasi yang berkualitas. Untuk mendukung proses otonomi daerah dan demokrasi lokal, dalam tulisan menjelaskan :

“Strengthening local government is advocated as a necessary step and overcoming the problems of and over-centralised trial listed state. The case for strengthening local government past not only upon the problems to be overcome, but on the positive contribution that local authorities can make the quality of democracy. It has long been recognised that local authorities enable for more people to participate in government ... one of the main consequences was political education particularly for what he regarded as the lower classes”^{xiii}

(Memperkuat *sistem* pemerintahan daerah dianjurkan sebagai langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah kebijakan negara yang terlalu sentralistik. Kasus ini untuk memperkuat pemerintahan daerah bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, tetapi berkontribusi positif agar pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Telah diakui bahwa otoritas-otoritas lokal memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (daerah) ... salah satu konsekuensi utama adalah pendidikan politik terutama kepada masyarakat kelas bawah).

Untuk itu dalam proses demokratisasi politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditujukan untuk mewujudkan partisipasi politik warga, baik dalam proses politik khususnya pada proses konversi atau formulasi suatu kebijakan politik, juga dalam hal implementasi kebijakan publik itu.

Berdasarkan konsepsi pemikiran tersebut, signifikansi teori otonomi daerah Rondinelli dan politik lokal Stewart dapat menjelaskan dinamika politik lokal melalui pemilihan yang melahirkan pemimpin lokal yang representatif, sehingga pemerintahan daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan proses demokratisasi daerah dan mengurangi pemusatan kekuasaan oleh pemerintah pusat.

2. Elit Politik

Sejumlah studi tentang elit memusatkan perhatian pada peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara maju. Peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara-negara maju berbeda-beda. Dalam beberapa masyarakat tradisional, elit penguasa telah memberikan perlawanan yang kuat terhadap perubahan. Di negara yang sedang melaksanakan modernisasi, ditemukan elit tertentu yang sangat aktif memimpin pembangunan.

Dalam studi ini, teori elit yang digunakan adalah teori elit politik dari Suzanne Keller untuk menjelaskan keterlibatan elit politik secara personal dalam lapangan politik. Juga digunakan teori elit politik Gaetano Mosca untuk membantu menganalisis posisi elit politik dalam organisasi. Keller menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan dalam tipe apapun pasti terdapat sekelompok kecil orang yang mampu mengendalikan masyarakat yang lainnya demi kepentingan kelompok kecil tersebut.

Keller selanjutnya mengemukakan bahwa :

“tidak semua elit berperan dan mempunyai suatu dampak sosial yang umum dan bertahan, hanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai elit penentu yang terdiri dari para pemimpin politik, ekonomi dan

militer, para pemimpin moral (elit agama), budayawan (elit budaya), dan kaum intelektual (elit ilmuwan).xiv

3. Primordialisme dan Kelompok Etnik

a. Primordialisme

Salah satu masalah politik domestik yang dihadapi di negara-negara Asia dan Afrika seperti Indonesia, Malaysia, Birma, India, Lebanon, Maroko, dan Nigeria adalah konflik politik yang bersifat primordial. Perbedaan kultural itu adalah berkaitan dengan adat istiadat dan wilayah yang tersebar sebagaimana yang diamati oleh Geertz. Dalam pandangan Geertz, *Indonesia, Malaysia, Burma, India, Marocco and Nigeria, culturally distinct and geographically scattered, are as appropriate subjects as any for this type of plying survey of divided nations en route -- hypothesis -- to unity.*^{xv} (Indonesia, Malaysia, Burma, India, Maroko, dan Nigeria, yang memiliki adat yang berbeda-beda dan terpisah secara geografis, sebagai subyek penelitian yang tepat untuk melakukan studi tentang perbedaan setiap bangsa ke arah persatuan).

Menurut Geertz, konflik politik di negara-negara berkembang disebabkan oleh perbedaan dan pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.^{xvi} Ikatan primordial menurut Geertz adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai *given* yang disebabkan karena hubungan darah atau persamaan dalam agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Tentang primordial ini, Geertz menjelaskan :

... a primordial attachment is meant one that stems from the "givens"- or, more precissly, as culture is inevitably involved in such matters, the assumed "givens" – of social existence: immediate contiguity and kin connection mainly, but beyond them the givenness that stems from beeing born into a particular religious community, speaking a particular languange, or even a dialect of a languange, and following particular social practices. These congruities of blood, speech, custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, coerciveness in and of them selves.

(... suatu ikatan primordial diartikan berasal dari budaya alami atau lebih tepatnya sebagai budaya yang telah ada dan terlibat dalam persoalan-persoalan tersebut -- dengan keberadaan sosial : terutama hubungan

langsung dan hubungan kekerabatan, tetapi diluar itu keberadaan yang berasal dari satu keturunan menjadi masyarakat dengan agama tertentu, berbicara dengan bahasa tertentu atau pun dengan dialek tertentu serta mengikuti tradisi sosial tertentu. Persamaan darah, ucapan, kebiasaan dan lain sebagainya secara jelas terlihat unsur pemaksaan dan dianggap memiliki berlebihan pada diri mereka.)

Oleh karena itu, ikatan primordial menurut Geertz bukan merupakan hasil dari suatu hubungan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain.^{xvii} Rauf (2000:62-64) menjelaskan secara lengkap pandangan Geertz tentang primordialisme, seperti berikut : Kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan ras atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat dan kedaerahan. Orang-orang yang berasal dari suatu suku tertentu, umpamanya, akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama. Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dengan ras/suku. Seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga di mana ia dilahirkan, tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai kelompok ras atau suku tertentu melekat pada dirinya mekipun ia tidak mau mengakuinya.

Kedua ikatan primordial itu membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua persamaan itu membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apa pun. Dalam primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran agama yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apa pun.

Menurut Rauf (2000:69), salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial itu merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha untuk kepentingan politik. Namun kenyataannya kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pemimpin politik.

b. Kelompok Etnik

Di Indonesia istilah etnik hanya digunakan pada suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, serta tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan atau karena secara fisik benar-benar khas.^{xviii} Misalnya etnik Cina, Arab, Portugis. Namun perkembangan kemudian, istilah etnik juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia, misalnya etnik Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Batak, dan sebagainya. Istilah kelompok etnik sendiri merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sedangkan etnik merujuk pada orang-orang dalam kelompok.

Etnik digambarkan oleh Anthony D. Smith (1995:57) adalah :

In Ethnies are in turn defined named unit of population with common ancestry myths and historical memories, elements of shared culture, some link with a historic territory and same measure of solidarity, at least among their elit.^{xix}

(Pada umumnya, etnik merupakan nama-nama unit tertentu dari unit-unit populasi dengan mitos-mitos warisan biasa serta ingatan-ingatan sejarah, dan elemen-elemen dari budaya, sejumlah hubungan dengan wilayah historis dan ukuran-ukuran solidaritas tersebut, sekurang-kurangnya terjadi di antara elit mereka).

Dalam ilmu sosial, yang pertama yang membawa istilah kelompok etnik ke dalam studi sosial adalah sosiolog Jerman, Max Weber. Weber mendefinisikan kelompok etnik sebagai,

... interval group of human which entertain subjective belief throughbtheir common ancestors because of they have either or both same customs and physical types or even as result of colonization and migration memories.

(... sekelompok manusia tertentu yang secara subyektif memiliki kesamaan keyakinan dari nenek moyang karena adanya kesamaan tipe-tipe fisik atau kebiasaan atau keduanya, atau karena memiliki sejarah akibat penjajahan dan migrasi).^{xx}

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan etnik di Kota Jambi adalah suku-suku tertentu yang dianggap telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat di wilayah Kota Jambi. seperti etnik Melayu Jambi, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan Tionghoa lainnya.

4. Koalisi Multi Etnik

Teori Koalisi Multi Etnik Donal L. Horowitz adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa beberapa etnik dengan kondisi tertentu bisa melakukan konsolidasi untuk menentukan sebuah tujuan atau keputusan bersama. Teori ini digunakan untuk memahami peran politik etnik Melayu Jambi dengan melihat hubungan antar etnis yang kelihatan lebih harmonis, karena etnis mayoritas, Melayu Jambi mengambil peran pasif dalam politik yang terlihat tidak memiliki ambisi besar untuk memegang kekuasaan Walikota-Wakil Walikota Jambi secara langsung.

B. Metode Penelitian

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: lokasi penelitian, waktu, dan sumber dana, maka periset menerapkan metode campuran dalam melaksanakan riset. Metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pertama periset melakukan studi awal (*preliminary research*) dengan metode kualitatif. Pada tahap ini periset mempelajari beberapa sumber data yang berhubungan dengan partisipasi politik warga Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum legislative dan presiden pada tahun 2014 yang lalu. Data itu diperoleh dari hasil evaluasi partisipasi pemilih di Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada dua pemilu tersebut dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang diyakini memiliki kompetensi dalam memberikan jawaban terhadap masalah seputar perilaku memilih warga;
2. Hasil studi awal yang menunjukkan bahwa secara garis besar perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal yang jika tidak dikelola dengan baik akan cenderung memberikan pilihan yang salah ataupun pilihan yang dipengaruhi oleh unsur materialistis yang berbaya bagi kehidupan demokrasi di daerah ini. Alih-alih pemilihan langsung bisa menjadi salah satu pendorong berkembangnya demokrasi, justru akan memperlemah demokrasi itu sendiri.

3. Berikut daftar pengguna hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Kerinci:

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014**

NO.	URAIAN		RINCIAN																
			KEC. GUN UNG RAY A	KEC. BATA NG MERA NGIN	KEC. BUKI T KER MA N	KEC. KELI LING DAN AU	KEC. DAN AU KERI NCI	KEC. SITI NJA U LAU T	KEC. DEP ATI TUJ UH	KEC. AIR HAN GAT TIM UR	KEC. AIR HAN GAT HANG AT	KEC. AIR HAN GAT BARA T	KEC. SIUL AK MUK AI	KEC. GUN UNG KERI NCI	KEC. KA YU AR O	KEC. KAYU ARO BARAT	KEC. GU NU NG TUJ UH	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar	LK	3,77 7	4,574	5,43 0	9,44 0	7,46 9	6,23 3	6,12 9	7,82 7	4,988	4,118	9,076	4,56 8	5,244	7,5 21	7,744	5,22 1	99,3 59
		PR	3,71 6	4,300	5,30 7	9,88 8	7,65 8	6,57 3	6,95 4	8,26 6	5,532	4,305	9,237	4,35 4	4,955	7,1 74	7,434	4,94 0	100, 593

	Pemilih Tetap (DPT)	JML	7,493	8,874	10,737	19,328	15,127	12,806	13,083	16,093	10,520	8,423	18,313	8,922	10,199	14,695	15,178	10,161	199,952
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	2	87	9	20	0	0	2	1	3	1	18	2	9	11	1	0	166
		PR	2	104	12	18	0	0	6	4	2	4	9	0	9	8	0	1	179
	JML	4	191	21	38	0	0	8	5	5	5	5	27	2	18	19	1	1	345
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	51	30	82	177	17	113	77	5	28	15	71	66	85	75	63	28	983
		PR	44	31	67	160	8	119	92	2	24	15	50	50	76	52	57	25	872
	JML	95	61	149	337	25	232	169	7	52	30	30	121	116	161	127	120	53	1,855
4.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pe	LK	116	244	194	330	274	179	86	243	51	162	414	353	289	36	97	285	3,353
		PR	139	278	249	477	344	252	113	260	38	283	678	396	250	36	104	264	4,161

	ngguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	JML	255	522	443	807	618	431	199	503	89	445	1,092	749	539	72	201	549	7,514
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	3,946	4,935	5,715	9,967	7,760	6,525	6,294	8,076	5,070	4,296	9,579	4,989	5,627	7,643	7,905	5,534	103,861
		PR	3,901	4,713	5,635	10,543	8,010	6,944	7,165	8,532	5,596	4,607	9,974	4,800	5,290	7,270	7,595	5,230	105,805
		JML	7,847	9,648	11,350	20,510	15,770	13,469	13,459	16,608	10,666	8,903	19,553	9,789	10,917	14,913	15,500	10,764	209,666
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Peguna hak pilih dalam DPT	LK	2,730	2,988	3,195	7,599	4,456	4,134	5,201	6,098	4,027	3,048	6,539	3,494	3,509	6,468	6,656	4,672	74,814
		PR	2,779	2,974	3,398	8,302	4,745	4,505	6,046	6,890	4,793	3,433	7,180	3,538	3,395	6,309	6,367	4,641	79,295
		JML	5,509	5,962	6,593	15,901	9,201	8,639	11,247	12,988	8,820	6,481	13,719	7,032	6,904	12,777	13,023	9,313	154,109
2.		LK	2	82	9	14	0	0	1	0	0	1	19	2	15	6	3	0	154

	Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	PR	2	95	12	14	0	0	4	0	1	4	10	0	9	6	4	0	161
		JML	4	177	21	28	0	0	5	0	1	5	29	2	24	12	7	0	315
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	17	20	37	43	3	59	47	5	5	9	55	27	45	33	49	4	458
		PR	13	29	30	60	0	64	45	5	2	9	32	23	40	31	40	4	427
		JML	30	49	67	103	3	123	92	10	7	18	87	50	85	64	89	8	885
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan	LK	116	235	184	330	272	179	86	243	51	161	414	352	289	36	97	285	3,330
		PR	139	275	249	477	337	252	113	260	38	283	451	394	250	36	104	264	3,922
		JML	255	510	433	807	609	431	199	503	89	444	865	746	539	72	201	549	7,252

	(DPKtb) /pengguna KTP dan KK/ Nama sejenis lainnya																		
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	2,86 5	3,325	3,42 5	7,98 6	4,73 1	4,37 2	5,33 5	6,34 6	4,083	3,219	7,027	3,87 5	3,858	6,5 43	6,805	4,9 61	78,7 56
		PR	2,93 3	3,373	3,68 9	8,85 3	5,08 2	4,82 1	6,20 8	7,15 5	4,834	3,729	7,673	3,95 5	3,694	6,3 82	6,515	4,9 09	83,8 05
		JML	5,79 8	6,698	7,11 4	16,8 39	9,81 3	9,19 3	11,5 43	13,5 01	8,917	6,948	14,70 0	7,83 0	7,552	12, 925	13,320	9,8 70	162, 561
			74%	69%	63%	82%	62%	68%	86%	81%	84%	78%	75%	80%	69%	87 %	86%	92%	78%

Sementara itu, di Kota Sungai Penuh, partisipasi politik juga kurang lebih sama. Keterangan ini didapat dari wawancara yang dilakukan dengan nara sumber yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

4. Dengan hasil ini, riset kemudian diarahkan pada beberapa hal yang terkait dengan karakteristik pemilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sehingga diharapkan dengan model karakter pemilih yang ada di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, partisipasi politik warga dengan melakukan pilihan yang tepat terhadap calon yang muncul dalam panggung politik bisa berjalan sesuai harapan;
5. Pertanyaan riset disusun dalam tiga kategori yakni partisipasi dalam memilih, partisipasi (kesukarelaan) dalam politik, dan perilaku memilih, dan peran media dan *stake holder* dalam memengaruhi perilaku memilih. Pertanyaan riset (kuisisioner) yang menjadi salah satu instrument dalam riset ini akan dilampirkan dalam laporan hasil riset ini.
6. Pemilihan responden di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan *purposive sampling*. Berkenaan dengan pertanyaan riset yang diajukan, maka dipilihlah kepala desa atau perangkat desa sebagai nara sumber utama (responden). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sumber data yang memiliki pengetahuan cukup terhadap warga di desa masing-masing yang terpilih menjadi lokasi riset. Sedangkan di Kota Sungai Penuh pemilihan sampel dilakukan dengan metode random terhadap desa terpilih. Tiap-tiap desa akan ada dua orang sampel yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang lagi perempuan.
7. Berikut 50 nama desa yang telah dipilih secara acak dari 287 desa yang ada di Kabupaten Kerinci dan 25 desa/ kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh:

a. Kabupaten Kerinci:

NO	KECAMATAN	ACAK	DESA
1	GUNUNG RAYA	6	LEMPUR MUDIKA
		12	SUNGAI HANGAT
2	BUKIT KERMAN	3	LOLO GEDANG
		11	PONDOK
		12	PULAU PANDAN
3	KELILING DANAU	3	DUSUN BARU PULAU TENGAH
		18	PASAR JUJUN

		22	PONDOK SIGUANG
		26	SERUMPUN PAUH
		29	TANJUNG BATU
		31	TANJUNG PAUH MUDIK
4	BATANG MERANGIN	3	LUBUK PAKU
		8	TAMIAI
5	DANAU KERINCI	3	DUSUN BARU TANJUNG TANAH
		7	KOTO SALAK
		19	UJUNG PASIR
6	SITINJAU LAUT	2	AMBAI BAWAH
		5	BETUNG KUNING
		6	BUNGA TANJUNG
7	DEPATI TUJUH	6	KOTO PANJANG
		19	TEBAT IJUK
		20	TEBAT IJUK DILI
8	AIR HANGAT TIMUR	10	KEMANTAN HILIR
		12	KEMANTAN MUDIK
		13	KEMANTAN RAYA
		23	SUNGAI MEDANG
9	AIR HANGAT	1	AIR TENANG
		8	KOTO MAJIDIN MUDIK
		11	PASAR SEMURUP
10	AIR HANGAT BARAT	5	KECIL
		11	KOTO MUDIK
11	SIULAK	1	AIR TERJUN
		9	KOTO KAPEH
		21	SIULAK KECIL MUDIK

		23	SUNGAI LEBUH
		26	TUTUNG BUNGKUK
12	SIULAK MUKAI	1	KOTO LUA
		14	TEBING TINGGI
13	GUNUNG KERINCI	6	SIULAK DESAR MUDIK
		8	SUKO PANGKAT
		12	SUNGAI BETUNG MUDIK
14	KAYU ARO BARAT	3	BEDENG DUA
		6	GIRI MULYO
		12	SAKO DUO
15	KAYU ARO	9	KOTO TUO
		11	MEKAR JAYA
		15	SANGIR
		20	SUNGAI TANDUK
16	GUNUNG TUJUH	7	PELOMPEK PASAR BARU
		12	TANGKIL

b. Kota Sungai Penuh

NO	KECAMATAN	QUOTA	NO URUT DESA TERPILIH	DESA	RESPONDEN	LK	PR
						USIA	
1	Pondok Tinggi	3	4	Lawang Agung	2	> 30	< 30
			5	Permanti	2	<30	> 30
			6	Pondok Agung	2	> 30	< 30
2	Sungai Bungkal	2	1	Dusun Baru	2	<30	> 30
			5	Sungai Ning	2	> 30	< 30
3	Sungai Penuh	2	2	Gedang	2	<30	> 30
			5	Sungai Penuh	2	> 30	< 30
4	Hampanan Rawang	5	5	Koto Beringin	2	<30	> 30
			6	Koto Dian	2	> 30	< 30

			11	Simpang Tiga Rawang	2	<30	> 30
			12	Tanjung	2	> 30	< 30
			13	Tanjung Muda	2	<30	> 30
5	Koto Baru	2	4	Koto Baru	2	> 30	< 30
			6	Permai Indah	2	<30	> 30
6	Pesisir Bukit	3	3	Koto Keras	2	> 30	< 30
			4	Koto Lolo	2	<30	> 30
			6	Koto Tengah	2	> 30	< 30
7	Kumun Debai	3	3	Kumun Hilir	2	<30	> 30
			5	Muara Jaya	2	> 30	< 30
			8	Sandaran Galeh	2	<30	> 30
8	Tanah Kampung	5	1	Baru Debai	2	> 30	< 30
			3	Koto Padang	2	<30	> 30
			4	Koto Panap	2	> 30	< 30
			5	Koto Pudung	2	<30	> 30
			8	Kt Baru Tanah Kampung	2	> 30	< 30
		25			50		

8. Hasil dari penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif/ survey wawancara tertutup tersebut disampaikan dalam forum FGD yang dihadiri oleh stake holder guna memperoleh berbagai masukan dan saran terhadap hasil riset yang ada sehingga bisa mempertajam analisis guna memperoleh rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan partisipasi politik warga Kerinci, sedangkan di Kota Sungai Penuh tidak dilakukan FGD.
9. Riset dengan 50 orang responden yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Kerinci dan 50 orang di Kota Sungai Penuh yang juga tersebar di beberapa desa/ kelurahan dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:
 - a. Responden yang berjumlah 50 orang sebenarnya tidak cukup memadai untuk mewakili jumlah seluruh pemilih di Kabupaten yang berjumlah 209.666 (DPT Pemilihan Bupati Kerinci terakhir) dan juga sama halnya dengan Kota Sungai Penuh dengan jumlah pemilih \pm 90.000 orang.
 - b. Variabel demografis (jenis kelamin, pendapatan, usia, dll) juga tidak bisa mewakili responden secara proporsional, karena data yang

dianalisis akan terlalu kecil jika responden dibagi ke dalam beberapa variabel demografis. Namun cara ini tetap akan dilakukan, paling tidak bisa memberi gambaran sederhana pengaruh beberapa variabel demografis terhadap jawaban responden.

BAB II POLITIK DAN ISLAM

1. Kedudukan Politik Dalam Islam

Islam agama sempurna, mencakup seluruh urusan kehidupan manusia yang terdiri dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara, serta segala aktifitas yang meliputnya, seperti ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Islam tidak memilah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam setiap aktifitas mengandung unsur dunia dan akhirat sekaligus.^{xxi}

Shalat misalnya, dalam persepsi banyak orang ia adalah amalan akhirat ansyih. Tapi jika ditelaah lebih dalam, dapat ditemukan bahwa shalat adalah amalan akhirat sekaligus amalan dunia. Ia menjadi demikian karena, *pertama*, shalat dilaksanakan di dunia, pahalanya saja yang diperoleh di akhirat; *kedua*, shalat itu dzikir, dan setiap yang berdzikir pasti mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu kebutuhan asasi manusia dalam beraktifitas. Rasulullah saw jika sedang gundah, beliau berkata kepada Bilal: *"Tenangkanlah kami dengan shalat hai Bilal!"* dan yang *ketiga*, shalat sangat dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah, dan bagi yang melaksanakannya mendapatkan derajat 27 kali lipat dari pada yang shalat sendirian. Shalat berjamaah membuat kita – dengan sendrinya – bersilaturahmi, mendidik kita hidup bermasyarakat dan bernegara yang teratur dan rapi. Dalam shalat berjamaah harus ada *imam* dan *makmum* yang semua tindakannya harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, makmum harus taat pada imam, mengikuti semua gerakan dan perintah imam, apabila tidak maka shalat sang makmum tidak sah. Dan apabila sang imam salah atau khilaf, maka wajib bagi makmum untuk menegurnya sampai imam kembali kepada yang benar. Demikian pula seharusnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Contoh yang lain, kegiatan jual beli, dalam persepsi banyak orang, ia adalah kegiatan dunia ansyih. Padahal jika ditelaah lebih mendalam, maka ia pun sekaligus menjadi kegiatan akhirat. Hal itu, karena walaupun *zhahirnya* jual beli adalah amalan dunia, tapi karena di dalamnya ada aturan main yang harus di patuhi oleh masing-masing penjual dan pembeli, dan jika mereka patuh pada

atauran itu, maka keduanya mendapatkan pahala yang akan diperolehnya di akhirat, tapi jika salah satu atau keduanya menyalahi atauran tersebut, maka yang berbuat salah mendapatkan dosa, yang hukumannya akan ia dapatkan pula di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda, *“pedagang yang jujur mendapatkan naungan arasy pada hari kiamat.”*

Dengan demikian, semua amalan, baik *mahdhah* maupun *gairu mahdhah* di dalam Islam, memiliki kedudukan yang sama, termasuk di dalamnya politik. Bahkan jika politik berarti kekuasaan, Utsman bin ‘Affan ra berkata: *“Al-Qur’an lebih memerlukan kekuasaan dari pada kekuasaan membutuhkan Al-Qur’an.”*

Karena politik bagian dari keuniversalan Islam, maka setiap muslim meyakini bahwa Islam memiliki sistim politik yang bersumber dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah dan dikembangkan oleh para sahabat dan *salafussaleh*, sesuai dengan dinamika perkembangan hidup manusia setiap masa. Berikutnya setiap muslim pun siap menjalankan sistem itu, dan tidak akan menjalankan sistim yang lain, karena kahawatir akan tergelincir pada langkah-langkah syaitan. Itulah bagian dari pengertian firman Allah SWT; *“Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh). Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata.”* (Al-Baqarah: 208)

2. Peran Politik Dalam Dakwah

Allah telah menetapkan risalah penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada-Nya, kemudian menjadikannya khalifah dalam rangka membangun kemakmuran di muka bumi bagi para penghuninya yang terdiri dari manusia dan alam semesta.

Agar risalah ini menjadi abadi dalam sejarah peradaban manusia, Allah SWT ‘merekayasa’ agar dalam kehidupan terjadi hubungan interaksi ‘positif’ dan ‘negatif’ di antara semua makhluk-Nya secara umum, dan di antara manusia secara khusus. Yang dimaksud dengan interaksi positif ialah, adanya hubungan tolong menolong sesama makhluk. Sedangkan interaksi negatif ialah, adanya hubungan perang dan permusuhan sesama makhluk. Allah SWT berfirman:

“...Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai yang dicurahkan atas semesta alam.” (Al-Baqarah: 251)

Keabadian risalah tersebut sangat tergantung pada hasil dari setiap interaksi baik yang positif maupun negatif. Jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang saleh, yang pada gilirannya mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan; dan jika berada dalam peperangan, dimenangkan pula oleh orang-orang saleh itu, maka pasti yang akan terjadi adalah keabadian risalah.

Tapi jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang buruk yang bersepakat melaksanakan kejahatan dan permusuhan, dan selanjutnya mereka pula yang memenangkan peperangan, maka pasti yang akan terjadi adalah kehancuran.

Disinilah letak politik berperan dalam dakwah. Dakwah mengajak pada kebaikan, melaksanakan risalah penciptaan manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah semua bentuk kemungkaran, sementara politik berperan memberikan motivasi, perlindungan, pengamanan, fasilitas, dan pengayoman untuk terealisasinya risalah tersebut.

Sejarah telah membuktikan, bahwa naskah-naskah Al-Qur'an yang sangat ideal pernah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Pada zaman Nabi saw, seorang Bilal bin Rabah yang hamba sahaya pada masa jahiliyah menjadi orang merdeka pada masa Islam, dan memiliki kedudukan yang sama dengan para bangsawan Quraisy, seperti Abubakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini karena Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah saw mengajarkan persamaan derajat, sekaligus beliau sebagai pemimpin umat – dan tidak salah jika dikatakan pemimpin politik umat – menjamin realisasi persamaan derajat itu sendiri. Sehingga pernah suatu ketika beliau marah kepada seorang shabatnya yang mencela warna kulit Bilal.

Pada zaman yang sama, ketika Nabi saw mengirim pasukannya ke negeri Syam, beliau berpesan agar pasukan itu tidak menebang pohon kecuali untuk kebutuhan masak, melarang membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak ikut berperang dan orang yang telah menyerah, beliau juga melarang

membunuh orang yang sedang beribadah di gereja, dst. Ini semua adalah buah dari ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an.

Se Meninggal beliau, Rasulullah digantikan oleh Abubakar Siddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib secara berurutan. Pada zaman keempat sahabat itu, keadaan yang telah dibangun oleh Rasulullah saw tidak berubah, semua warga dibawa kepemimpinan khilafah menjalankan hak dan kewajiban, mendapatkan persamaan derajat, tidak ada yang dizalimi kecuali mendapatkan haknya, atau berbuat zalim kecuali telah mendapatkan sangsi. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan Islam di Damaskus, kemudian di Bagdad dan Andalusia.

Tapi seiring dengan perkembangan berikutnya, umat menjauh dari agamanya, kegiatan agama dijauhkan dari kegiatan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, demikian pula sebaliknya, hingga sampailah zaman itu pada generasi kita.

Kita bersedih dengan keadaan kita, umat Islam sebagai umat terbesar di alam raya ini, tapi terzalimi hak-haknya, umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri tercinta ini, tapi terbantai di Maluku dan di Poso, tidak boleh menjalankan syariat agamanya secara kaffah, dihambat para pemimpinnya yang saleh untuk memimpin bangsanya, tidak diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan ekonominya, dst.

3. Karakteristik Politisi Dakwah

Setiap muslim berkewajiban menjadi dai, paling tidak, untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana Rasulullah saw berwasiat: *"Sampaikanlah tentang ajaranku walaupun satu ayat."* Dan sekaligus secara perlahan menjadi politisi dakwah, sebagaimana telah kami ungkapkan sebelumnya. Adapun sifat dan karakter yang dimiliki para politisi dakwah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Keperibadian politik.

Keperibadian politik adalah sekumpulan orientasi politik yang terbentuk pada diri seseorang dalam menyikapi dunia politik. Ia memiliki tiga aspek: **pertama**, Doktrin-doktrin yang mengandung makna politis, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Doktrin-doktrin yang tidak langsung meliputi:

(1) Doktrin khusus yang berkaitan dengan ketuhanan, manusia, alam semesta, pengetahuan dan nilai-nilai. Yaitu:

- Keyakinan bahwa Allah swt adalah *musyarri'* (Pembuat hukum).
- Keyakinan bahwa *al-wala'* (loyalitas) dan *al-bara'* (anti loyalitas) adalah konsekuensi aqidah, loyal hanya kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Dan kepada selainnya tidak akan pernah loyal.
- Keyakinan bahwa semua manusia sama dalam hal penciptaan, hak dan kewajibannya.
- Keyakinan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, dengan tujuan memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Allah, dan bahwa alam ini ditundukkan untuknya.
- Keyakinan bahwa sumber nilai-nilai adalah wahyu.

(2) Doktrin khusus tentang masyarakat, perubahan sosial, dan perempuan. Yaitu:

- Keyakinan bahwa karakteristik dan prinsip masyarakat muslim adalah akhlak.
- Keyakinan bahwa perubahan sosial adalah atas dasar kemauan dan gerak manusia itu sendiri, berangkat dari pembinaan individu, kemudian keluarga, masyarakat dan negara.
- Keyakinan bahwa perempuan memiliki hak-hak politik sama dengan hak-hak politik laki-laki.

(3) Doktrin-doktrin yang mengandung makna politis secara langsung adalah:

- Doktrin khusus tentang keadilan dan kedamaian sosial.
- Doktrin tentang strategi moneter, kemerdekaan dan kebangkitan ekonomi.
- Doktrin khusus tentang hukum dan kekuasaan, bahwa hukum Islam sebagai sumber kekuasaan; umat sebagai lembaga pengawas dan yang mengangkat dan menurunkan pemerintah; syura adalah keniscayaan;

keadilan ditegakkan; kebebasan dan persamaan derajat adalah hak dan kebutuhan setiap orang.

- Doktrin khusus tentang kepahlawanan dan kewarganegaraan.
- Doktrin khusus tentang kemerdekaan kultural; kewajiban membebaskan diri dari penjajahan; dan kewajiban berjihad di jalan Allah.

Kedua, Pengetahuan dan wawasan politik, masalah ini akan dibahas pada point memiliki kesadaran politik; **Ketiga**, Orientasi dan perasaan politik. Para politisi dakwah yang telah meyakini doktrin-doktrin di atas, disertai dengan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang politik, maka pasti ia memiliki orientasi dan perasaan politik. Diantaranya: Loyal kepada pemerintah yang menegakkan syariat Islam; rasa ukhuwah insaniyah dan islamiyah, serta rasa persamaan derajat dengan orang lain; hasrat melakukan perubahan sosial dengan *ishlah* dan *tarbiyah*; menghindari kekerasan; menghargai pendapat orang-orang berpengalaman; sikap positif terhadap aktivitas positif; benci kesewenang-wenangan; cinta kemerdekaan; rasa kewarganegaraan dan kepahlawanan; rasa benci dan tunduk kepada bangsa lain; mendukung gerakangerakan-gerakan kemerdekaan di seluruh dunia; bermusuhan dengan penjajah dan seterusnya. Kesemua orientasi dan perasaan politik tersebut sangat penting, dan seharusnya politisi dakwah membangunnya pada dirinya dan pada umat Islam serta pada masyarakat umum.

b. Memiliki kesadaran politik.

Kesadaran politik yang musti dimiliki oleh seorang politisi dakwah adalah: **Pertama**, Kesadaran misi, yaitu kesadaran terhadap ajaran Islam itu sendiri, atau kesadaran akan doktrin-doktrin yang telah disebutkan di depan. Ia meliputi pada penyadaran akan dasar-dasar aqidah, akhlak, sosial, ekonomi dan politik Islam; Juga meliputi pada penyadaran akan pentingnya aplikasi Islam, sebagai asas identitas umat; Selanjutnya meliputi pula pada penyadaran terhadap karakteristik konseptualnya. Misalnya ia adalah konsep universal untuk seluruh zaman dan tempat. **Kedua**, Kesadaran gerakan, yaitu

kesadaran terhadap ajaran islam tidak akan terwujud di tengah masyarakat dan negara kecuali ada organisasi pergerakan yang berkomitmen dengan asas Islam, dan bekerja untuk mewujudkannya. **Ketiga**, Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakat, yang meliputi probelematika politik nasional, regional dan internasional. Contoh untuk problematika nasional adalah penegakan hukum Islam dengan usulan agar UUD 1945 pasal 29 diamandemen, dan memasukkan ke dalamnya tujuh kata piagam Jakarta. **Keempat**, Kesadaran akan hakikat dan sikap politik, yaitu kemampuan politisi dakwah memahami peristiwa politik dan sadar akan sikap kekuatan-kekuatan politik dalam menghadapi berbagai peristiwa politik itu sendiri. Kesadaran semacam ini tidak mungkin ada tanpa kemampuan *mutabaah* terhadap berbagai peristiwa dan berbagai kekuatan politik baik melalui media massa maupun kajian-kajian. **Keempat**, kesadaran politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran misi adalah kesadaran permanen; kesadaran gerakan adalah kesadaran permanen dan fleksibel; kesadaran problematika politik adalah kesadaran fleksibel berdasarkan pandangan yang permanen; dan kesadaran sikap politik adalah kesadaran fleksibel sesuai jenis peristiwa.

c. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Partisipasi politik seseorang sangat bergantung orientasi politiknya yang telah terbentuk oleh doktrin-doktrin politik yang telah diyakininya. Maka seorang politisi dakwah yang telah meyakini bahwa menegakkan pemerintahan Islam adalah kewajiban, pasti akan berpartisipasi pada setiap kegiatan politik yang kan menuju ke sana. Dalam rangka menggapai keyakinan tersebut, seorang politisi dakwah dapat berpartisipasi; *pertama*, dalam bentuk individu dengan menjadi anggota organisasi politik; sedang yang *kedua*, dalam bentuk memberikan solusi atas realita dan problematika masyarakat.

Contoh untuk bentuk yang pertama adalah, lahirnya parati-partai politik yang sebelumnya hanya berbentuk gerakan-gerakan dakwah yang terorganisir rapi dan sistematis, yang kemudian setiap anggota gerakan

menjadi anggota partai politik secara otomatis. Dan mensukseskan setiap kegiatan partai tersebut pada setiap jenjang struktur yang menjadi hak dan wewenangnya.

Sedang contoh untuk bentuk yang kedua adalah, keikutserataan seorang politisi dakwah dalam aksi-aksi politik, seperti demonsntrasi menentang kebijakan nasional ataupun internasional yang merugikan agama Islam, atau keikutsertaan seorang politisi dakwah dalam pelayanan sosial, misalnya dengan membantu warga yang sedang mendapatkan musibah atau bencana alam, atau dengan melakukan upaya menghilangkan buta huruf di masyarakat, atau dengan mengadakan aksi mengangkat masyarakat dari bawah garis kemiskinan dls.

4. Langkah-langkah Menjadi Politisi Dakwah

Semoga dengan uraian di depan dapat menghilangkan keterbelahan pemahaman bahwa dakwah dan politik adalah sesuatu yang kuntra, dan tidak dapat disatukan dalam satu aktifitas. Semoga pula dapat ‘menggoda’ kita untuk menanam saham kebaikan dalam rangka membangun peradaban dunia, yang sesuai kehendak Allah, melalui aktifitas dakwah dan politik. Akan tetapi dari mana kita memulai? **Pertama**, Membangun kembali pemahaman kegamaan kita, bahwa agama Islam itu agama yang syamil, mencakup seluruh aspek kehidupan; bahwa agama Islam itu dasarnya aqidah, batangnya amal ibadah dan buahnya adalah akhlak; bahwa agama Islam itu diamalkan di dunia dan pahalanya diperoleh di akhirat; bahwa agama Islam itu diturunkan Allah untuk semua manusia, dan sterusnya. Pemahaman ini harus dibangun melalui peroses belajar mengajar. Islam mengajarkan bahwa belajar dilakukan dengan dua hal: *Satu*, dengan membaca fenomena-fenomena alam dan literatur-literatur; dan *dua*, dengan belajar melalui guru. Kedua metode tersebut harus dilakukan oleh stiap muslim, tidak boleh hanya salah satunya. Sebab dengan membaca saja seseorang dapat tersesat, atau dengan melalui guru saja, seseorang memiliki wawasan yang sempit. Karena dengan demikian, kita sebagai politisi dakwah dapat mengamalkan Islam penuh tanggung jawab, tidak berdasarkan hawa nafsu. **Kedua**, Membangun kembali kebersamaan kita, bahwa kita itu bersaudara, tidak dipisahkan oleh

batasan darah, suku dan bangsa, apalagi hanya dibatasi oleh perbedaan organisasi keagamaan atau perbedaan madzhab; bahwa kita itu perlu kerjasama dan berjamaah, karena memang setiap amalan dalam agama Islam sangat dianjurkan dilakukan dalam berjamaah; bahwa kita tidak dapat merealisasikan sebagian besar ajaran agama Islam kecuali dengan bersama-sama. Kebersamaan dapat dibangun dengan kemampuan kita melepaskan egoisme individu masing-masing kita, sehingga kita dapat menerima dan memberi nasehat orang lain, serta mampu bersabar atas kekurangan dan perbedaan dalam kebersamaan. Sehingga kebersamaan ini membuat politisi dakwah menjadi kuat dan dapat segera mencapai cita-citanya. **Ketiga**, Mengenal kembali potensi dan kelebihan diri kita; bahwa masing-masing kita memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang lain; bahwa kelebihan kita dapat menjadi keunggulan yang menutupi kekurangan orang lain; bahwa keunggulan kita dapat menghapus kelemahan kita. Yang penting, dengan keunggulan itu dapat kita jadikan sebagai sarana yang memanjangkan umur pahala kita. Sehingga kita menumbuhkannya secara terus dan menjadi politisi dakwah melalui keunggulan tersebut. **Keempat**, Memahami kembali realitas kehidupan kita; bahwa kita hidup pada hari ini, bukan hari kemarin yang sangat mungkin kulturnya jauh berbeda dengan hari ini; bahwa kehidupan itu penuh dengan dinamika, sehingga kita politisi dakwah dituntut memiliki kemampuan mengaktualisasikan ajaran Islam, dalam bentuk sarana, metode, dan cara sesuai zaman, tanpa harus keluar dari frame dasar agama ini. Akhirnya, Telah menjadi harapan kami, semoga kita dapat menjadi politisi dakwah yang memelopori pelaksanaan ajaran Islam, secara bersama-sama, berangkat dari keunggulan kita masing-masing, dalam nuansa memperhatikan keadaan, perubahan dan dinamika zaman, yang pada gilirannya Islam tidak hanya tertulis dalam Al-Qur'an, tergambar dalam Sunnah dan diterjemah dalam buku-buku, tapi menjadi kenyataan di muka bumi. Atau tidak hanya menjadi gambar dan maket, tapi dapat menjadi bangunan yang kokoh, yang semua orang dan makhluk dapat bernaun dan tinggal dengan damai dalam bangunan tersebut.

BAB III

KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH

A. Gambaran Umum Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Meskipun survey ini dilakukan secara terpisah dengan lokasi yang berbeda yakni di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, namun peneliti meyakini bahwa kedua daerah ini, masih merupakan entitas yang sama. Perbedaan kedua daerah ini hanyalah pada factor administrative saja karena ada pemekeraan kabupaten yang terjadi pada tahun 2008. Jauh sebelum 2008 tersebut, dua daerah ini merupakan satu wilayah, meskipun karakter demografisnya berbeda, karena Kota Sungai Penuh—sebagian di antaranya, terutama di lingkungan pasar Sungai Penuh—penduduknya relative heterogen, terutama dengan masyarakat pendatang^{xxii} dari Sumatera Barat. Sehingga baik temuan yang didapat dalam penelitian maupun solusi dari temuan masalah dari hasil penelitian ini dianggap tidak berbeda antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Temuan yang berbeda dari masing-masing lokasi menandakan bahwa terdapat dinamika di dua wilayah ini, namun tetap bisa dianggap sebagai satu entitas.

Survei dengan wawancara tatap muka dengan responden sebanyak 50 orang tokoh masyarakat di 50 desa telah dilaksanakan pada 22-24 Mei 2015 di Kabupaten Kerinci dan 50 orang warga Kota Sungai Penuh yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli – 3 Agustus 2015. Tim pewawancara adalah dosen, mahasiswa dari STAIN Kerinci , dan tim pewawancara lain yang telah diberi pembekalan cukup untuk melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam kuisisioner.^{xxiii} Seperti yang telah disebut di atas, kuisisioner yang tersebar di 50 desa di Kabupaten yang telah dipilih secara acak ini diisi oleh kepala desa/ perangkat desa dengan tujuan mereka yang diminta sebagai responden ini memiliki pengetahuan yang relatif lebih luas terhadap persoalan yang ingin diteliti. Begitupun di Kota Sungai Penuh, responden dippilih secara acak dan memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Gambaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara umum akan dijelaskan dengan singkat guna memulai pembahasan penelitian ini.

1. Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci terletak di Provinsi Jambi, sekitar 400 kilometer dari Ibu Kota Provinsi Jambi. Kerinci merupakan kabupaten paling barat di provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Sebelum menjadi bagian dari Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci adalah salah satu Kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat. Adat dan budaya di Kerinci, sangat dipengaruhi oleh Budaya Minang, bahkan sampai hari ini. Bahasa yang digunakan di pasar utama Sungai Penuh, adalah bahasa Minang. Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah 3.808,5km² dan penduduk 237.065 jiwa. Mayoritas penduduk Kerinci merupakan suku Kerinci.^{xxiv} Letak Kabupaten Kerinci berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, namun karena bukan merupakan daerah perlintasan, daerah ini tidak terlalu ramai dikunjungi.. Berikut letak wilayah Kabupaten Kerinci dalam peta:

Gambar 1. Peta Provinsi Jambi



Sumber: Gambar diambil dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi

Catatan sejarah menyebutkan, jauh sebelum daerah Kerinci pernah menjadi bagian dari Ke residenan Jambi, setelah itu pada tahun 1922 Kerinci dipindahkan kedalam kekuasaan Keresidenan Sumatera Barat, setelah dimasukkan kedalam

Keresidenan Sumatera Barat pada tahun 1927 Kerinci pernah menyuarakan keinginannya agar kembali lagi kedalam Keresidenan Jambi, namun aspirasi rakyat Kerinci pada tahun 1927 itu tidak mendapat tanggapan dari pemerintahan Belanda yang menjajah Jambi saat itu. Ketika rakyat Riau dan Jambi mengajukan otonomi daerah tingkat I, rakyat Kerinci kembali menyampaikan keinginannya bersatu dalam Propinsi Jambi (Pidato Prof. Idris Jakfar, SH: Sekitar Perjuangan Otonomi Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci: Diterbitkan oleh Pemda Tingkat II Kabupaten Kerinci 10-11-1989). Alasan dan pertimbangan yang mendorong rakyat Kerinci untuk bergabung dengan Propinsi Jambi antara lain:

- a. Daerah Kerinci, seluruh Kerinci Rendah dan sebagian Daerah Kerinci Tinggi berada dalam satu kesatuan dengan Keresidenan Jambi. Dengan demikian maka daerah Kerinci sekarang yang pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya, menjadi terpisah dari kesatuan Luak nan XVI dan Kerinci Rendah;
- b. Secara historis pada masa lalu Kerinci mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Jambi persahabatan tersebut terjalin baik antara Depati Empat Alam Kerinci dengan Kesultanan Jambi;
- c. Daerah Keresidenan Sumatera Barat mempunyai wilayah yang sangat luas, hal ini telah menyebabkan daerah kecil dan terisolir yang dinaunginya seperti daerah Kerinci menjadi kurang mendapat perhatian;
- d. Sehubungan dengan poin 3 di atas, maka bila daerah Kerinci berada dalam Propinsi yang relatif kecil wilayahnya, diharapkan gerak pembangunan dapat berjalan relatif lebih cepat dan aspirasi rakyat akan mudah disalurkan.^{xxv}

Posisi Kerinci secara geografis dan pengaruh sejarah politik Kerinci di Provinsi Jambi di atas, memberikan pengaruh terhadap pilihan politik warga Kerinci, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kota Sungai Penuh

- a. Kondisi Geografis Kota Sungai Penuh

Geografis, Iklim, dan Topografi Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 101° 14' 32" BT sampai dengan 101° 27' 31" BT dan 02° 01' 40" LS sampai dengan 02° 14' 54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2 %) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8 %) dan dengan jumlah penduduk 87.804 jiwa (BPS kota Sungai Penuh, data tahun 2010) Luas wilayah/ Teritorial Kota Sungai Penuh adalah 391,50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan, 4 kelurahan, dan 65 desa.

b. Pemekaran Kota Sungai Penuh^{xxvi}

Pembentukan Kota sungai Penuh akan mendekatkan rentang kendali pemerintahan, sehingga jarak rata-rata dari masing-masing kecamatan ke pusat pemerintahan menjadi hanya 5 Km⁹ dengan rata-rata tempuh 5,83 menit. Dengan semakin dekatnya rentang kendali pemerintahan tersebut diharapkan akan lebih memudahkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga nantinya akan mempercepat pemabangunan dan pengembangan wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Menurut Pasal 16 PP 78/ 2007 sebagai pengganti PP No 129/ 2000 ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh daerah Kabupaten Kota yang akan dimekarkan salah satunya adalah syarat administratif. Berkenaan dengan hal tersebut, Mursimin (anggota DPRD Kab. Kerinci periode 2004-2009) menjelaskan bahwa : “Adapun berkenaan dengan persyaratan administratif bagi pembentukan Kota Sungai Penuh telah terpenuhi, antara lain :

- (1) Surat yang menunjukkan aspirasi masyarakat bagi pemebentukan Kota Sungai Penuh, yang berasal dari :
 - (a) Forum Komunikasi LSM Kabupaten kerinci (Surat pernyataan tanggal 15 Maret 2007 perihal Dukungan terhadap Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembantuan Kota Sungai Penuh;
 - (b) Forum LSM Kerinci (Surat pernyataan tanggal 14 Maret 2007 perihal Dukungan terhadap Pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan Kota Sungai Penuh);
 - (c) Masyarakat kaum (Surat dukungan yang berasal dari empat kecamatan di kabupaten Kerinci).

- (2) Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 tanggal 10 Maret 2005 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
- (3) Surat Keputusan DPRD kabupaten Kerinci Nomor 09 tanggal 13 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- (4) Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor 9 tanggal 3 Juli 2006 tentang persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
- (5) Surat Gubernur Jambi Nomor 100/3884/pemotda tanggal 1 September 2006 perhal Usul Pemekaran Kabupaten kerinci dan Pembentukan Kota sungai Penuh di Provinsi Jambi.
- (6) Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor 100/ 2341/ Pem&Otda tanggal 12 Agustus 2006 tentang Dukungan dana untuk Modal pangkal dan Biaya Operasional Kota Sungai Penuh yang ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati Kerinci).
- (7) Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep31/ 2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, yakni di kawasan Ranah Pemetik.
- (8) Surat Keputusan pimpinan DPRD kabupaten Kerinci Nomor 7 tanggal 10 Maret 2007 tentang Persetujuan penetapan Lokasi Calon Ibukota kabupaten Kerinci, yakni Diktum Pertama yang menyetujui lokasi calon ibukota Kabupaten Kerinci di kawasan renah pemetik. Kemudian Pada diktum kedua ditetapkan lokasi calon ibukota kabupaten Kerinci sebagaimana dimakud pada diktum pertama yang akan ditetapkan secara definitif setelah selesainya studi kelayakan oleh konsultan profesional yang independen dans elanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci.
- (9) Surat Bupati Kerinci Nomor 100/26/ Pem & Otda tanggal 24 April 2007 tentang Laporan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

c. Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran

Setelah terbentuknya kota Sungai Penuh melalui UU No 25 Tahun 2008, untuk melaksanakan roda pemerintahan, maka dibentuklah perangkat daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/ 3860/sj tanggal 15 Desember 2008 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat daerah Kota Sungai Penuh, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan walikota Sungai Penuh No 1 tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Sungai Penuh, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Kota Sungai Penuh dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, beberapa kendala ditemukan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Sungai Penuh. Di antara masalah tersebut adalah: prasarana pendidikan yang masih terbatas, infrastruktur perkantoran yang belum bisa dipercepat karena Kabupaten Induk (kerinci) belum sepenuhnya menempati perkantoran yang ada di Kabupaten Kerinci.

Kondisi geografis, sosial, dan budaya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh seperti ini jika dihubungkan dengan politik masa kini, tentu membutuhkan kajian yang tidak sederhana. Hal ini mengingat bangsa Indonesia, tidak saja baru memasuki masa reformasi seperti dalam bagian pendahuluan di atas, namun juga telah terlalu terbiasa dengan kehidupan politik masa orde Baru. Bagi Indonesia, yang baru ± 17 tahun menikmati masa demokrasi setelah berada dalam cengkraman pemerintah otoriter yang terbungkus dalam wajah Demokrasi “semu” Pancasila yang dipraktikkan Soeharto pada masa-masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI 1966-1998. (Lidle, 2001:61)

Prilaku memilih dalam politik dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Bila kesukarelaan warga dalam politik bisa tumbuh maka, tananan demokrasi semakin kuat. (lampiran pedoman riset, surat KPU RI nomor 155/KPU/IV/2015).

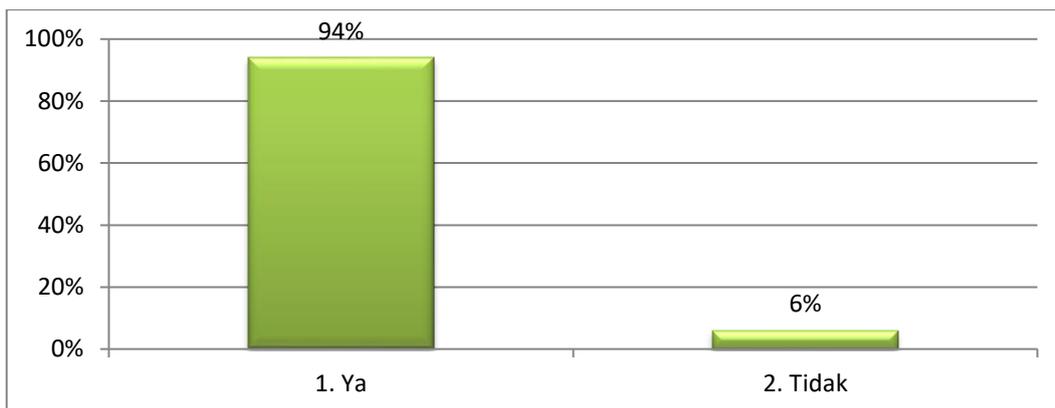
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

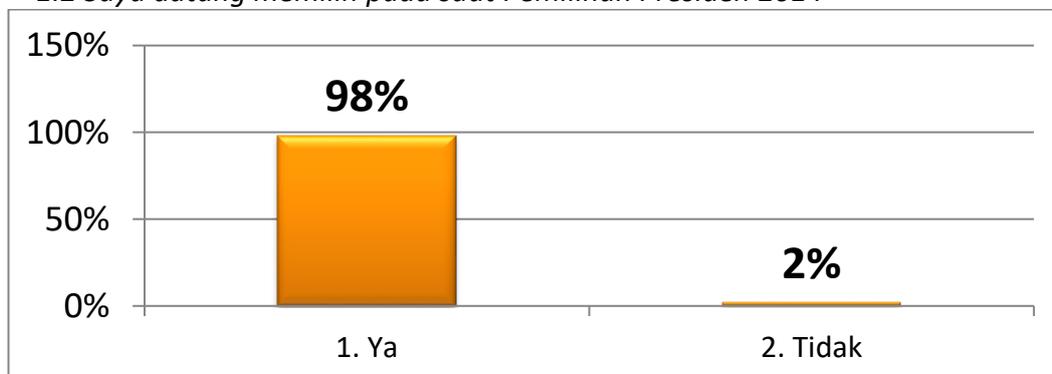
A. Prilaku Memilih Warga Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh

1. Hasil/ temuan riset dari survei wawancara di 50 desa terpilih di Kabupaten Kerinci:

1.1. Saya datang memilih pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014



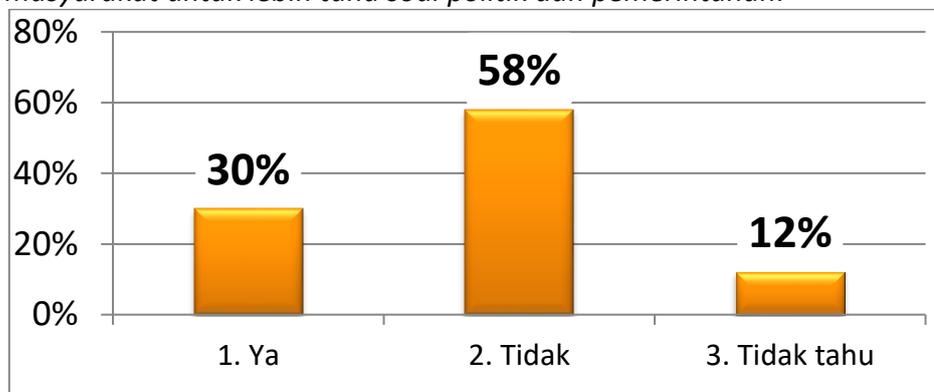
1.2 Saya datang memilih pada saat Pemilihan Presiden 2014



Profil responden pada umumnya adalah mereka yang aktif berpolitik. Hal ini telah menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan calon responden. Mereka yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan secara baik prilaku politik warga adalah mereka yang juga cenderung aktif dalam politik. Jawab pertanyaan 1.1. dan 1.2. di atas menandakan bahwa pilihan peneliti terhadap responden cukup baik. Berdasarkan temuan dalam dua pertanyaan wawancara di atas, responden diyakini memiliki tingkat keaktifan dalam politik cukup baik dan linear dengan hal itu, diyakini juga cukup mampu

member jawaban sebagaimana diminta dalam pertanyaan survey yang diajukan oleh pewawancara.

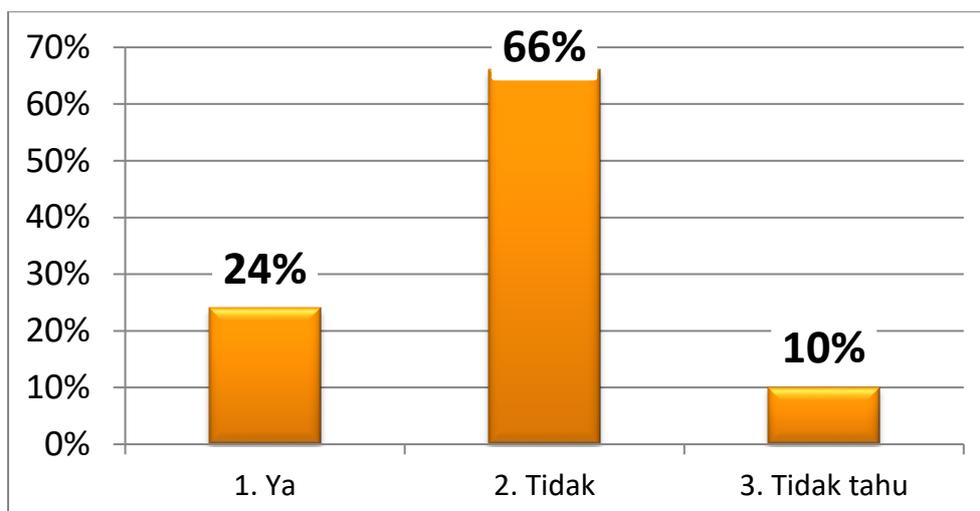
1.3. *Di desa kami, keberadaan LSM atau Ormas memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih tahu soal politik dan pemerintahan:*



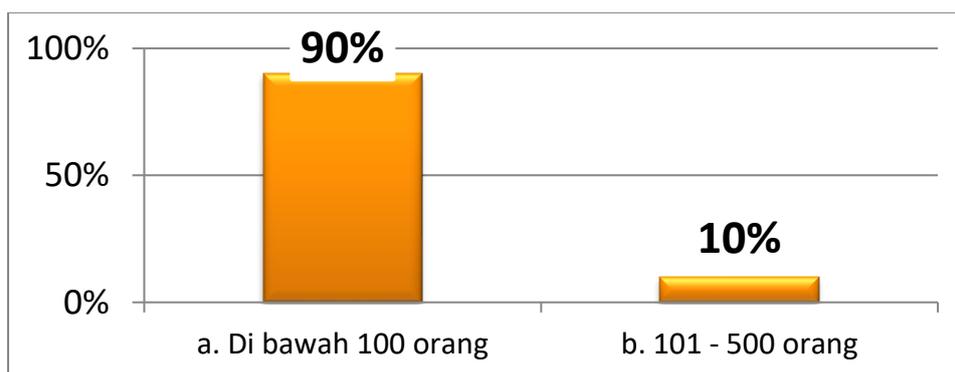
Sebagai catatan, keikutsertaan warga Kabupaten Kerinci dalam mengikuti proses pemilihan pada Pemilu terakhir berada pada angka 78%. Angka ini melebihi target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yakni 75%. Jika diteliti lebih lanjut, berdasarkan kondisi riil pemilih di Kabupaten Kerinci, maka keikutsertaan warga dalam memberi suara dalam Pemilu terakhir bisa lebih besar lagi. Sebab, sebagian pemilih yang terdaftar adalah mereka yang bekerja di luar negeri (Malaysia dan sekitarnya) yang pada masa pemungutan suara sedang berada di sana, tidak sedang berada di tempat.

Hasil dari pertanyaan 1.3. memberi gambaran bahwa peran LSM yang 30% saja dalam partisipasi politik, menunjukkan meskipun minim dorongan dari LSM, tidak membuat masyarakat Kerinci enggan memilih. Antusiasme tetap ditunjukkan tanpa peran LSM yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa angka 78% yang muncul sebagai partisipasi pemilih di Kerinci tidak menunjukkan bahwa ada peran LSM yang cukup aktif memberi dorongan kepada masyarakat untuk memilih.

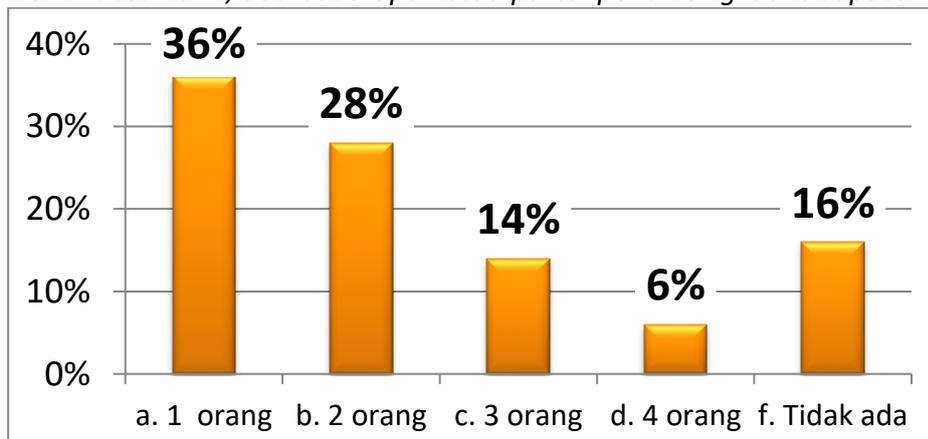
1.4. *Di Desa kami, terdapat organisasi selain LSM atau Ormas seperti: Majelis ta'lim, kelompok pengajian, kelompok arisan yang sangat aktif memberi dorongan kepada masyarakat untuk tahu soal politik dan pemerintahan*



1.5. Di desa kami, jumlah masyarakat yang ikut aktif dalam partai politik adalah kira-kira 1 di antara:



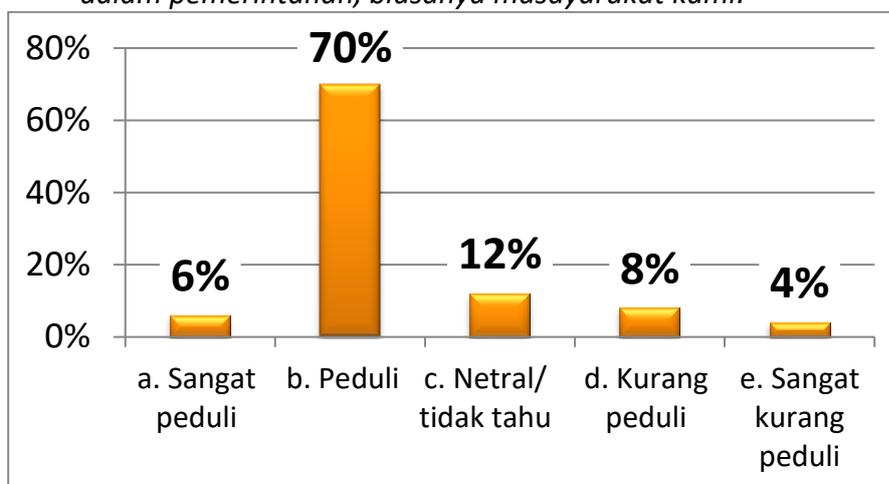
1.6. Di desa kami, ada beberapa ketua partai politik tingkat kabupaten:



Pertanyaan 1.4., 1.5., dan 1.6. mirip dengan hasil pada pertanyaan 1.3. di atas. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun warga tidak merasa ada banyak anggota partai aktif di tempat mereka dan tidak banyak organisasi lain

di tempat mereka, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi warga dalam memberikan pilihan. Singkatnya, warga Kerinci tidak terikat oleh lembaga-lembaga non-formal dalam melakukan kegiatan politik mereka. Warga tetap datang ke tempat pemilihan tanpa ada banyak pengaruh dari unsur-unsur yang telah disebut di atas.

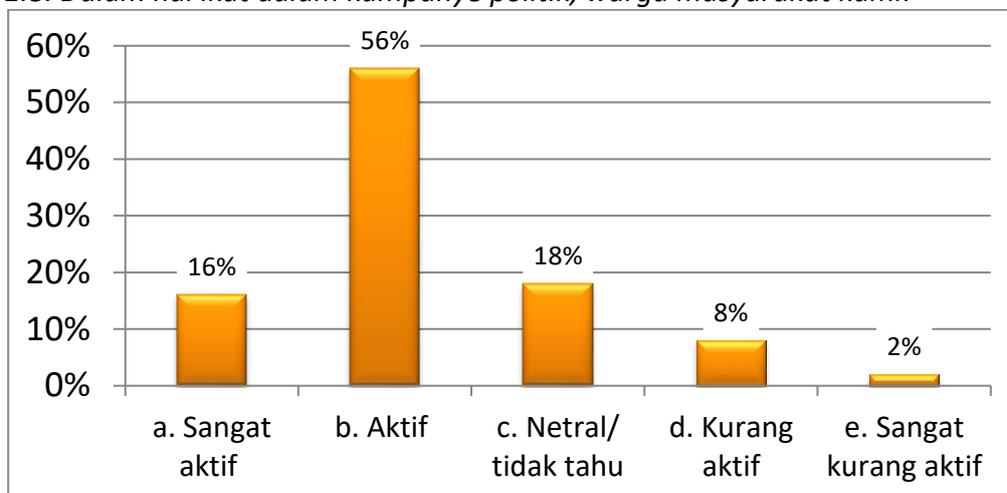
1.7. Jika diajak untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan peran warga dalam pemerintahan, biasanya masyarakat kami:



Keikutsertaan masyarakat Kerinci dalam kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan Pemilu di dalamnya, hampir sama tingginya dengan jumlah pemilih yang memberikan suaranya ke TPS. Angka dalam survey menunjukkan 76% sedangkan dalam keadaan riilnya ada 78%. Angka ini masih berada dalam rentang Margin of Error (ME).

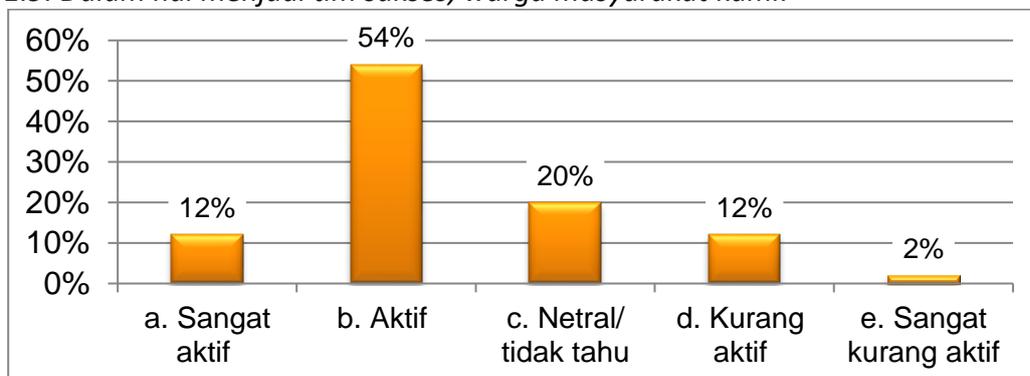
Yang menjadi fokus di sini adalah penekanan pada kata “ajakan”. Mesti ada sesuatu yang sifatnya mengajak, menghimbau, dan mengingatkan mereka secara langsung untuk turutserta dalam kegiatan yang dimaksud. Berdasarkan hasil survey ini, ajakan memiliki pengaruh kepada warga untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah, termasuk di dalamnya politik. Terkait dengan beberapa pertanyaan sebelumnya tentang keterlibatan lembaga lain dalam mengajak mereka dalam berpolitik menunjukkan bahwa sejauh ini lembaga-lembaga itu tidak memiliki peran signifikan di tengah-tengah masyarakat Kerinci dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan politik.

1.8. Dalam hal ikut dalam kampanye politik, warga masyarakat kami:



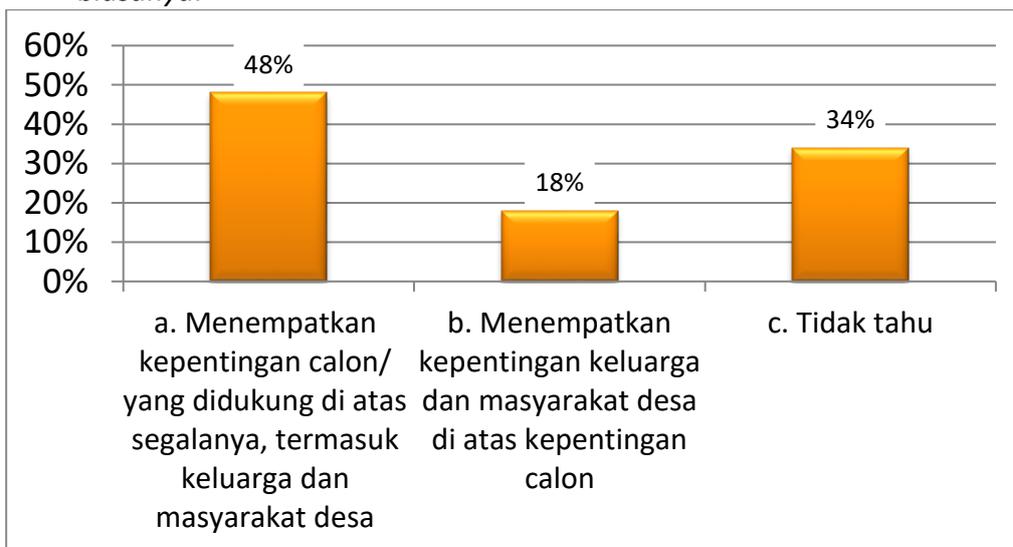
Warga Kerincipun memiliki kepedulian yang cukup tinggi dalam kegiatan kampanye politik. Hal ini berbanding lurus dengan partisipasi dalam kegiatan pemerintah sebagaimana terdapat pada jawaban responden terhadap pertanyaan 1.7. di atas. Warga Kerinci yang secara sosiologis merupakan warga yang hampir mono-etnik, tidak tercampur secara signifikan dengan warga lain, memiliki kecenderungan terpengaruh oleh warga lain secara langsung, karena komunikasi antar etnik yang relative homogen tersebut berjalan cukup intens. Dalam hal kampanye politik atau kegiatan lain yang mengumpulkan warga dalam satu acara cenderung ramai diikuti, karena kebutuhan sosiologis komunitas yang sering melakukan komunikasi ini cukup tinggi dalam hal berkumpul saling menyapa dan bertukar informasi.

1.9. Dalam hal menjadi tim sukses, warga masyarakat kami:



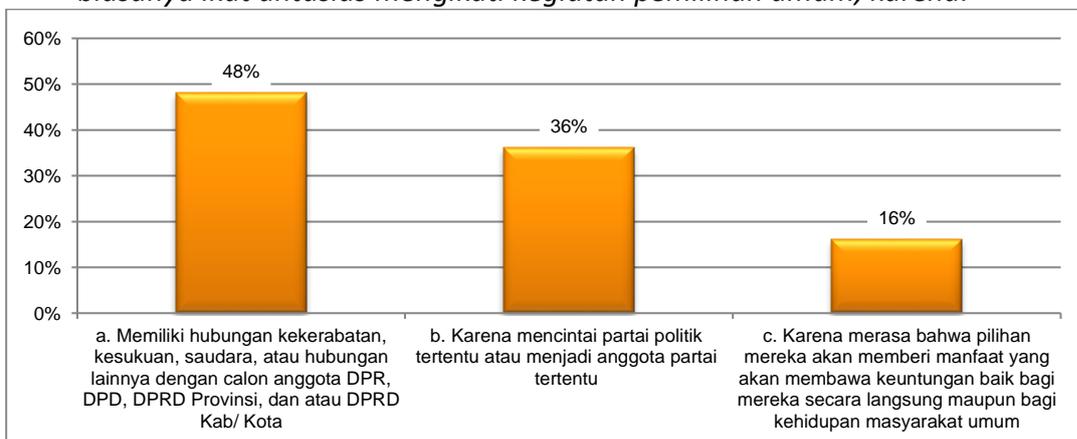
Postur masyarakat Kerici yang secara sosiologis terhubung dengan baik antar satu dengan yang lainnya juga memperlihatkan bahwa, warga memiliki kepedulian yang sama dalam hal menjadi tim sukses dalam setiap hajatan politik, baik untuk legislatif, maupun pemilihan kepala daerah

1.10. Dalam memperjuangkan calon yang mereka dukung, masyarakat kami, biasanya:



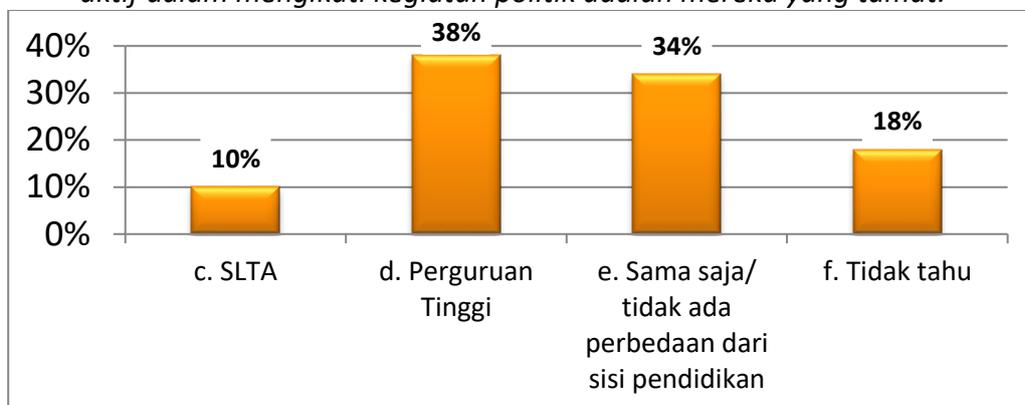
Keseriusan warga yang menjadi tim sukses dalam setiap hajatan politik memiliki pengaruh dalam mengajak warga lain dalam melakukan pemilihan. Menjadi tim sukses dengan menunjukkan keseriusan yang cukup tinggi juga menggambarkan bahwa profil masyarakat Kerinci yang cukup peduli pada masalah-masalah politik.

1.11. (Pertanyaan berikut boleh memilih beberapa pilihan) Masyarakat kami biasanya ikut antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, karena:



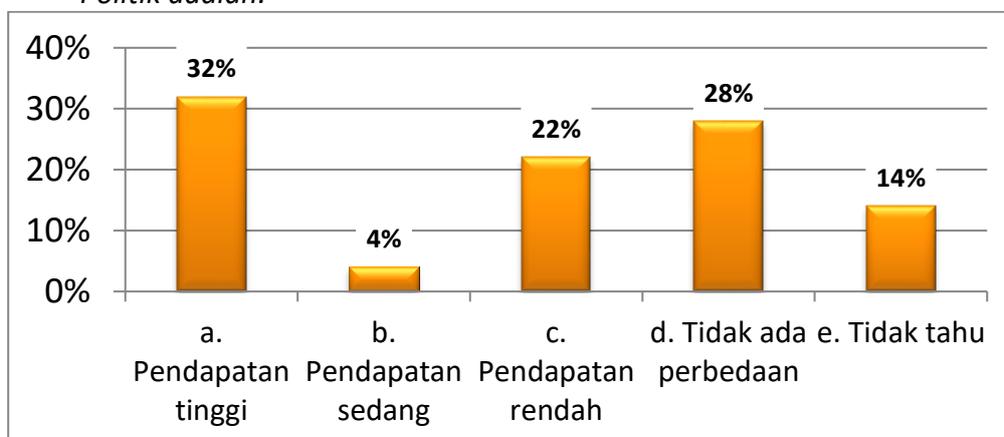
Terlihat dalam hasil jawaban responden 1.11., partisipasi warga dipengaruhi oleh kerabat/ keluarga mereka yang menjadi calon baik di legislatif, maupun kepala daerah. Hasil ini menunjukkan juga bahwa sosialisasi di Kerinci bisa dilakukan melalui koordinator keluarga yang sudah terbentuk secara kultural, biasa disebut dengan “tumbi”. Tumbi ini adalah rumpun keluarga yang terbentuk secara turun temurun. Biasanya mereka melakukan komunikasi dalam bentuk arisan, pengajian keluarga, dan kegiatan-kegiatan keuarga lainnya.

1.12. Jika diurutkan dari tingkat pendidikan, maka urutan mereka yang paling aktif dalam mengikuti kegiatan politik adalah mereka yang tamat:



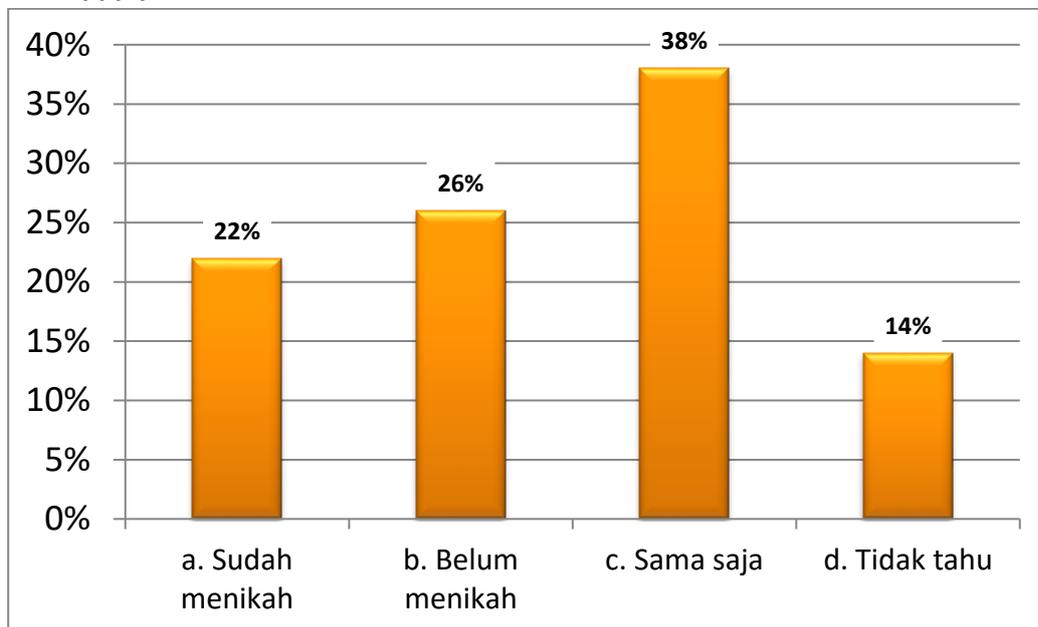
Ada kepercayaan cukup bahwa pendidikan memberikan pengaruh dalam keaktifan dalam politik, meskipun ada 34% yang memandang bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam bidang politik.

1.13. Jika dilihat dari tingkat pendapatan, maka mereka yang aktif dalam Politik adalah:



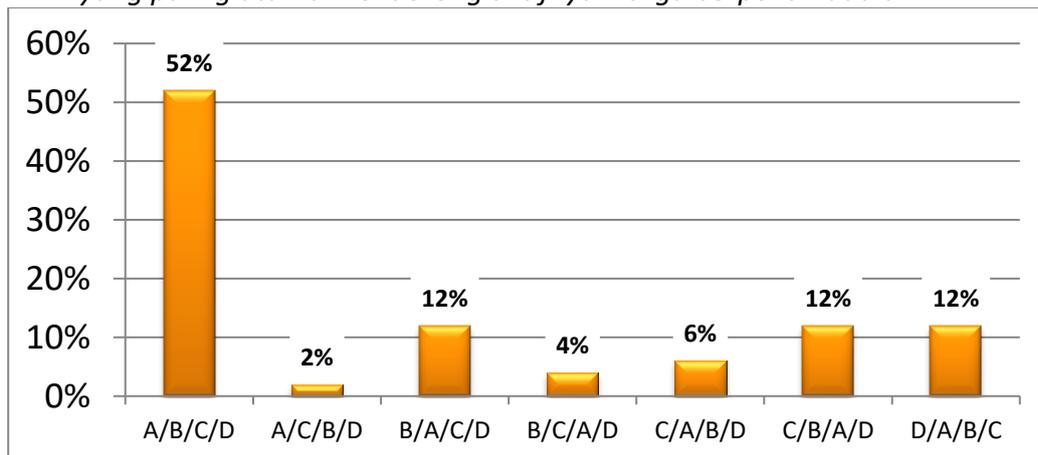
Tidak terlihat perbedaan mencolok antara orang yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi dalam politik.

1.14. Jika dilihat dari status pernikahan, maka mereka yang aktif dalam politik adalah:



Sama halnya dengan variabel pendapatan, status perkawinan juga tidak dianggap oleh responden sebagai variabel yang berpengaruh dalam politik.

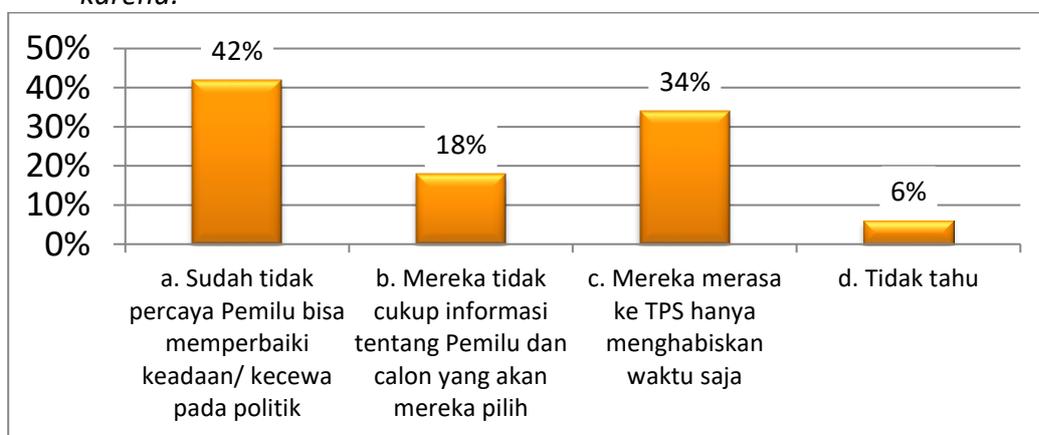
1.15. (urutkan mulai dari yang paling utama [1], [2], dst) Jika diurutkan, maka yang paling utama mendorong aktifnya warga berpolitik adalah:



- A. Tingginya Pendidikan
- B. Keaktifan mengikuti organisasi
- C. Tingkat Ekonomi yang sudah sejahtera
- D. Tidak tahu

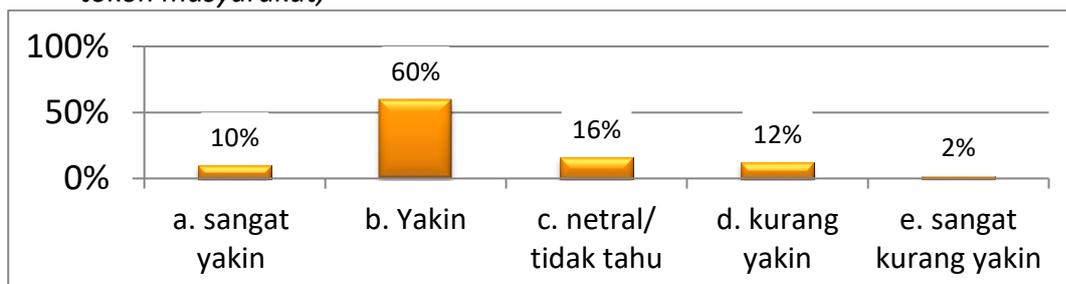
Berdasarkan pendapat responden faktor pendidikan dipercaya memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi politik. Faktor berikutnya adalah keaktifan dalam organisasi . Selanjutnya baru pengaruh ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut, maka terlihat bahwa responden merasa yakin bahwa pendidikan akan memberi pengaruh dalam partisipasi politik. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan level pendidikan warga.

1.16. Faktor utama yang membuat masyarakat kami tidak datang ke TPS karena:



Faktor utama yang membuat warga tidak tertarik untuk memilih, karena mereka sudah merasa bahwa pemilihan umum tidak bisa lagi diandalkan untuk memperbaiki nasib mereka (42%), sehingga datang ke TPS membuat mereka merasa hanya buang-buang waktu(34%). Terlihat bahwa faktor sosialisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kesukarelaan warga dalam memilih. Boleh jadi sosialisasi yang dilakukan pada beberapa kali pemilu terakhir sudah cukup baik.

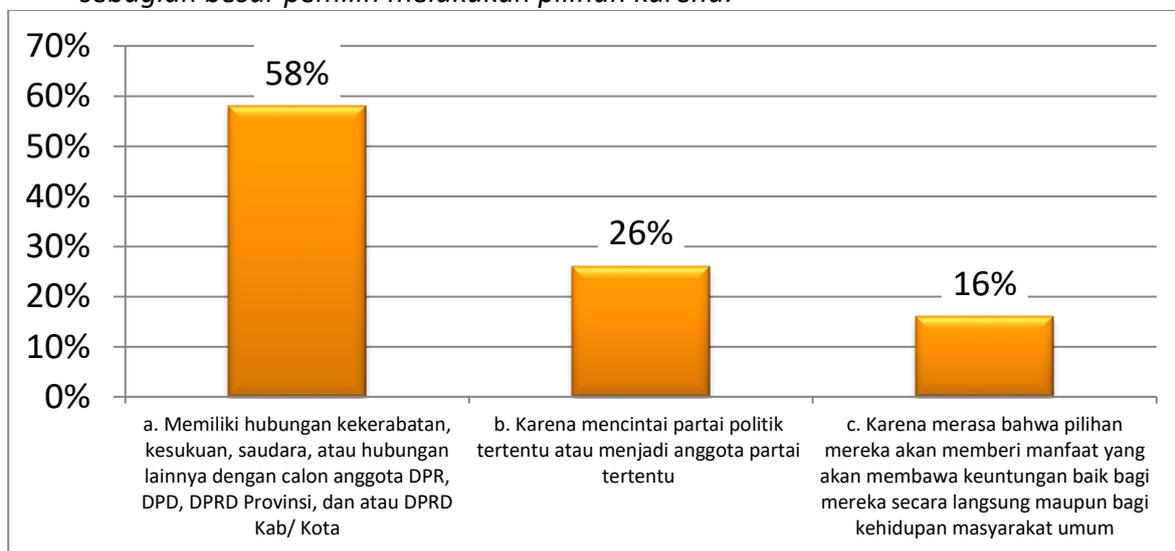
1.17. Pemilih di desa kami akan datang ke TPS, jika mendapat himbauan dari tokoh masyarakat,



Meskipun keengganan memilih karena merasa kegiatan pemilihan umum tidak banyak pengaruh dalam memperbaiki nasib pemilih, namun

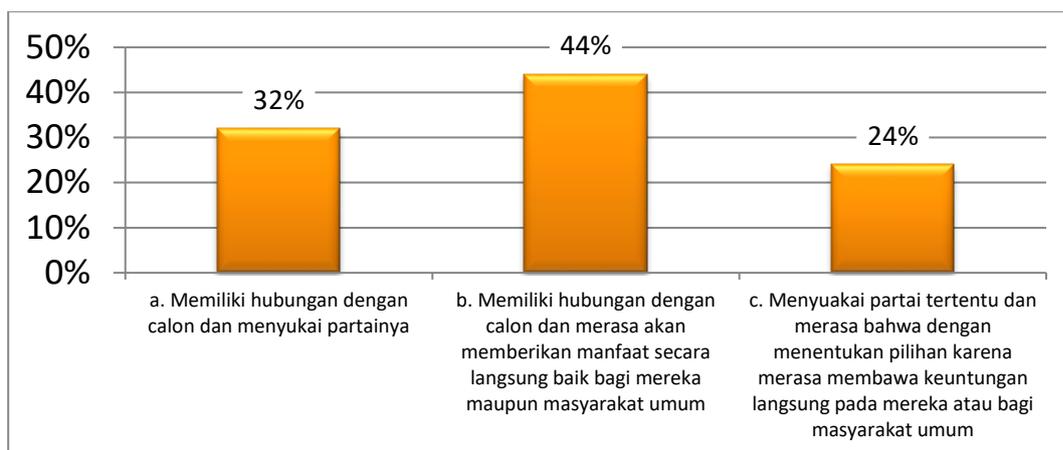
mereka antusias memilih atau ikut kegiatan politik kalau diminta/ dihimbau oleh tokoh masyarakat setempat untuk memilih (10%+60%). Berdasarkan hasil ini, maka perlu dipertimbangkan sebuah langkah untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam kelompok terkecil dari masyarakat kerinci, bisa dalam bentuk RT (di Kerinci biasa dikenal dengan larik/lorong) atau dusun, untuk mengajak warga berpartisipasi secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa imbalan uang/ barang.

1.18. Pada saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang lalu, saya yakin sebagian besar pemilih melakukan pilihan karena:



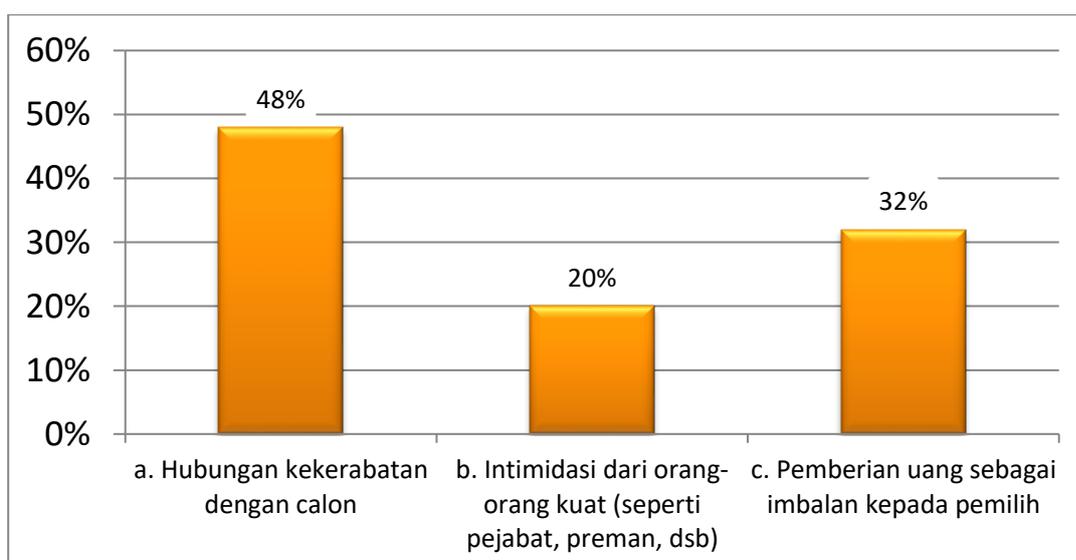
Berdasarkan jawaban yang ditunjukkan terhadap pertanyaan 1.18 di atas, menunjukkan bahwa warga Kerinci terpengaruh secara sosiologis dalam melakukan pilihan politik mereka. Pertimbangan lain yang berdasarkan unsur psikologis dan pilihan rasional menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pilihan yang berdasarkan unsur kekerabatan.

1.19. Jika dikombinasikan alasan memilih pada Pemilu yang lalu adalah:



Namun, jika dibandingkan dikombinasikan alasan memilih, baik dari faktor sosiologis-psikologis, sosiologis-pilihan rasional, dan psikologis-rasional, maka pemilih di Kerinci terpengaruh lebih besar oleh gabungan pilihan sosiologis-rasional, ketimbang sosiologis-psikologis. Ini menunjukkan bahwa unsur sosiologis yang digabungkan dengan pilihan rasional (kepentingan pemilih) memiliki pengaruh cukup signifikan dalam memengaruhi pilihan warga.

1.20. *Pilihan berikut yang paling berpengaruh kepada pilihan pemilih di tingkat grass root adalah:*



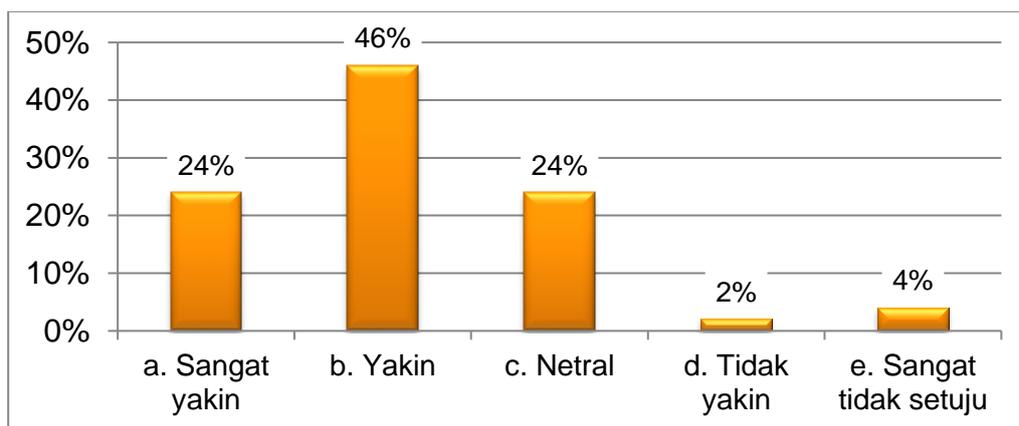
Bahkan, jika dibandingkan dengan pengaruh uang, faktor kekerabatan memiliki pengaruh lebih besar dalam penentuan siapa yang akan dipilih. Secara teoritis ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori perilaku memilih dari unsur sosiologis, maupun bisa dijelaskan dengan teori primordialisme yang dikemukakan oleh Geertz. Ikatan primordial menurut Geertz adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai *given* yang disebabkan karena hubungan darah atau persamaan dalam agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Tentang primordial ini, Geertz menjelesakan suatu ikatan primordial diartikan berasal dari budaya alami atau lebih tepatnya sebagai budaya yang telah ada dan terlibat dalam persoalan-persoalan tersebut terutama hubungan langsung dan hubungan kekerabatan, tetapi diluar itu keberadaan yang berasal dari satu keturunan menjadi masyarakat dengan agama tertentu, berbicara dengan bahasa tertentu atau pun dengan dialek tertentu serta mengikuti tradisi sosial tertentu. Persamaan darah, ucapan, kebiasaan dan lain sebagainya secara jelas terlihat unsur pemaksaan dan dianggap memiliki ikatan berlebihan pada diri mereka. Oleh karena itu, ikatan primordial menurut Geertz bukan merupakan hasil dari suatu hubungan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain.^{xxvii} Rauf (2000:62-64) menjelaskan secara lengkap pandangan Geertz tentang primordialisme yakni kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan ras atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat dan kedaerahan. Orang-orang yang berasal dari suatu suku tertentu, umpamanya, akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama. Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dengan ras/suku. Seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga di mana ia dilahirkan, tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak

berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai kelompok ras atau suku tertentu melekat pada dirinya meskipun ia tidak mau mengakuinya.

Selanjutnya, ikatan primordial itu membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua persamaan itu membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apa pun. Dalam primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran agama yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun.

Menurut Rauf (2000:69), salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial itu merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha untuk kepentingan politik. Namun kenyataannya kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pemimpin politik untuk menarik dukungan warga. Misal seorang politisi yang memiliki jaringan keluarga yang lebih besar, cenderung mudah memperoleh dukungan dibanding dengan calon lain yang tidak memiliki jaringan keluarga yang besar.

1.21. Pada pemilihan umum yang lalu, saya meyakini bahwa masyarakat sangat dipengaruhi oleh politik uang:



Hampir sama di banyak tempat yang sudah menjadi perbincangan umum, bahwa politik uang sangat memengaruhi warga dalam menentukan pilihan. Meskipun di Kerinci kekerabatan yang memengaruhi pilihan politik warga, namun kadar/ level kedekatan primordialnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Boleh jadi keterikatan primordial masih kuat pada keluarga inti, namun pada level hubungan keluarga yang sudah agak jauh, barangkali ikatan primordialisme itu bisa hilang.

2. Hasil diskusi Focus Group Discussion (FGD)

FGD yang dilaksanakan di ruang media center KPU Kabupaten Kerinci, Senin, 13 Juli 2015. Berdasarkan diskusi yang berlangsung dalam FGD yang dihadiri oleh beberapa stake holder tersebut, berikut beberapa hal yang menjadi catatan penting:

- a. Hasil yang ditunjukkan oleh responden dengan wawancara tatap muka di atas mendapat respon berupa pernyataan persetujuan terhadap tingginya angka partisipasi politik warga Kerinci, baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Bahkan para stake holder meyakini bahwa dalam setiap hajatan pemilihan kepala daerahpun, partisipasi masyarakat Kerinci juga cukup tinggi. Ada kepedulian dari masyarakat untuk ikut serta ambil bagian dalam mengikuti setiap acara pemilihan yang dilangsungkan.
- b. Terhadap poin pertama, justeru yang disampaikan oleh stake holder, antusiasme yang tinggi tersebut justeru mendorong masyarakat melakukan aktivitas lain yang justeru secara hukum mengganggu pelaksanaan pemilihan yang demokratis. Saking aktifnya pemilih, dalam

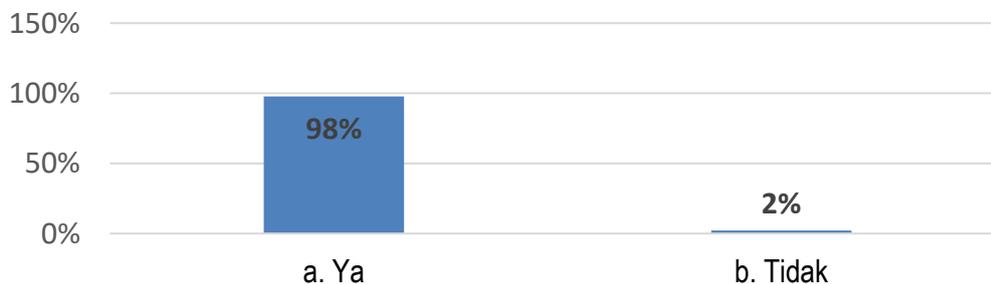
beberapa kesempatan mereka memanfaatkan keadaan untuk melakukan pilihan lebih dari satu kali. Upaya itu dilakukan dengan berbagai alasan. Ada yang alasan karena membantu kandidat tertentu yang sudah mereka janjikan untuk dibantu, maupun membantu pihak keluarga yang berada di dapil lain.

- c. Seperti yang ditemui dalam survey wawancara, pemilih di Kerinci sangat dipengaruhi oleh unsur kekeluargaan atau ikatan persaudaraan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dukungan terhadap keluarga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Namun, hasil survey juga menunjukkan bahwa, mereka yang merasa bahwa ikatan kekeluargaan memiliki pengaruh besar terhadap pemilih, namun pengaruh politik uang juga sangat tinggi mempengaruhi perilaku pemilih dalam melakukan pilihan mereka.

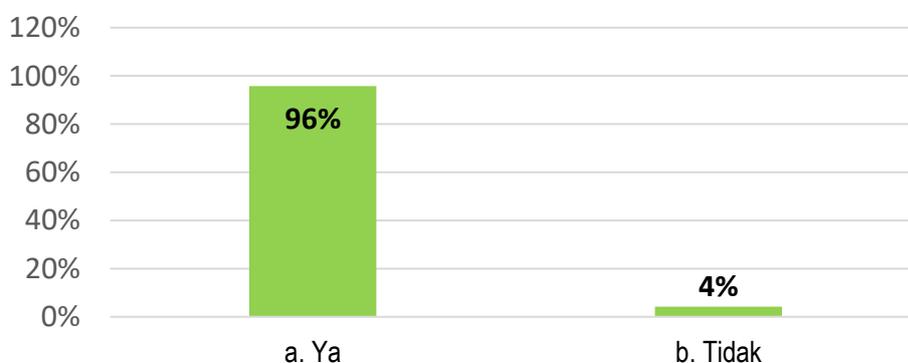
3. Hasil riset survey di Kota Sungai Penuh

a. Partisipasi Politik Warga

1.1. Saya datang memilih pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014



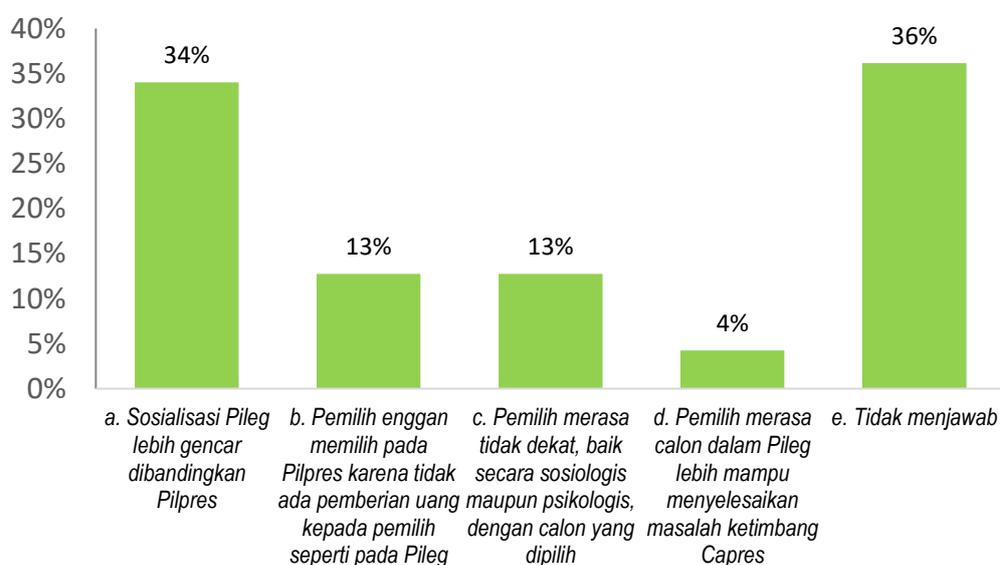
1.2. Saya datang memilih pada saat Pemilihan Presiden 2014



Profil responden pada umumnya adalah mereka yang aktif berpolitik. Hal ini telah menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan calon

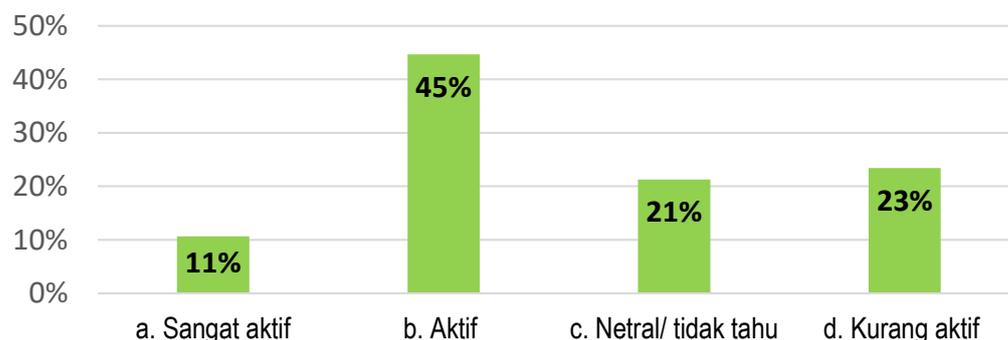
responden. Mereka yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan secara baik perilaku politik warga adalah mereka yang juga cenderung aktif dalam politik. Jawab pertanyaan 1.1. dan 1.2. di atas menandakan bahwa pilihan peneliti terhadap responden cukup baik.

1.3. Partisipasi pada Pilpres 2014 lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2014, menurut Anda mana di antara pilihan berikut yang paling berpengaruh

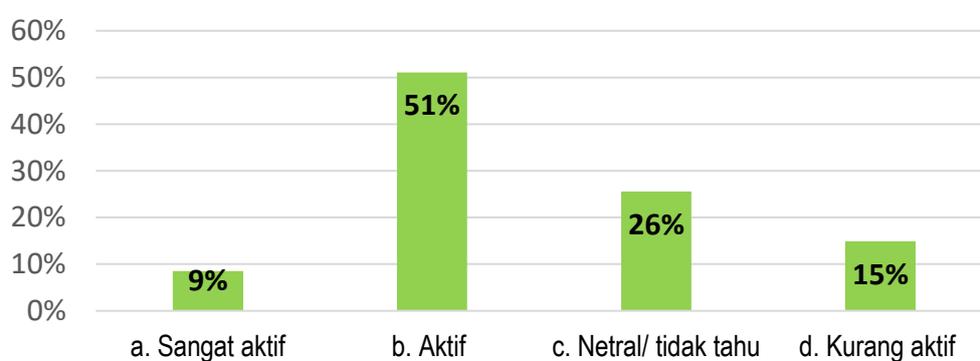


Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pertanyaan poin 1.3. di atas, terdapat masalah dalam sosialisasi. Artinya bahwa warga Kota Sungai Penuh merasakan bahwa penurunan suara yang ada di Pilpres akibat kurangnya sosialisasi. Dari konteks ini boleh jadi yang dimaksud dengan sosialisasi adalah terkait aktivitas calon presiden atau tim kampanye presiden yang tidak seaktif ketika pemilu legislatif.

1.4. Dalam hal ikut dalam kampanye politik, warga masyarakat kami:

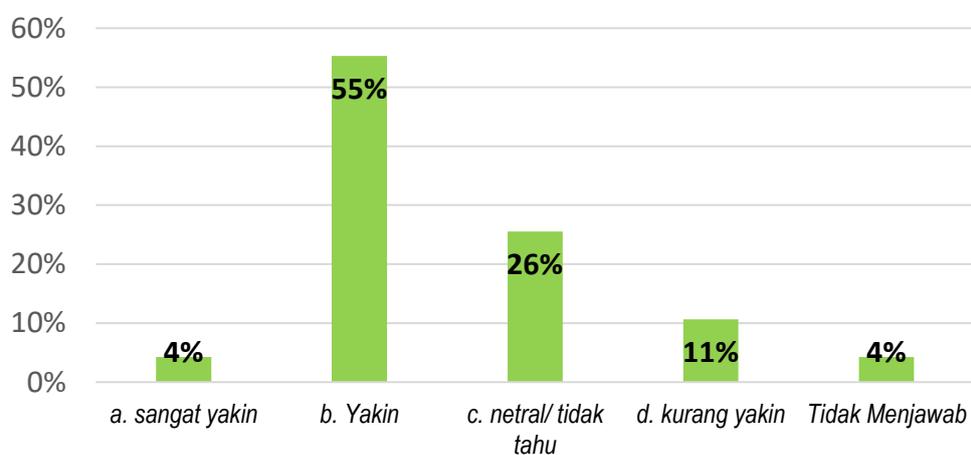


1.5. Dalam hal menjadi tim sukses, warga masyarakat kami:



Antusiasme warga Kota Sungai Penuh dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye cukup aktif seperti terlihat dalam hasil pada poin 1.4. Di samping itu hal yang sama juga terlihat antusiasme warga untuk terlibat sebagai tim pemenangan/tim sukses para kandidat.

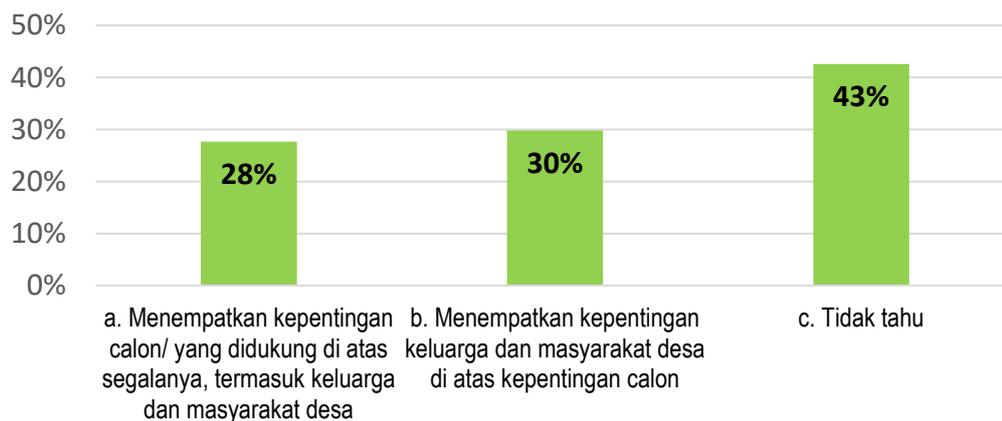
1.9. Pemilih di tempat kami akan datang ke TPS jika, mendapat himbauan dari tokoh



Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada poin 1.9. terlihat bahwa warga Kota Sungai Penuh akan mengikuti himbauan jika tokoh masyarakat mengajak warga untuk berpartisipasi dalam politik.

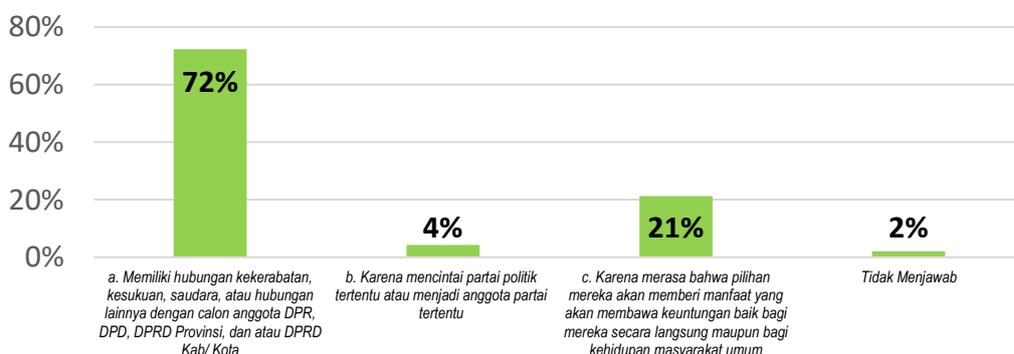
b. Prilaku Memilih (voting behaviour)

1.6. *Dalam memperjuangkan calon yang mereka dukung, masyarakat kami, biasanya:*



Dalam memperjuangkan pilihan mereka, warga Kota Sungai Penuh terikat oleh oleh dua hal, di mana yang satu dan lainnya memiliki pengaruh sama, yakni: hubungan keluarga dan tanggungjawab sebagai tim pemenang.

1.7. *(Pertanyaan berikut boleh memilih beberapa pilihan)Masyarakat kami biasanya ikut antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, karena:*

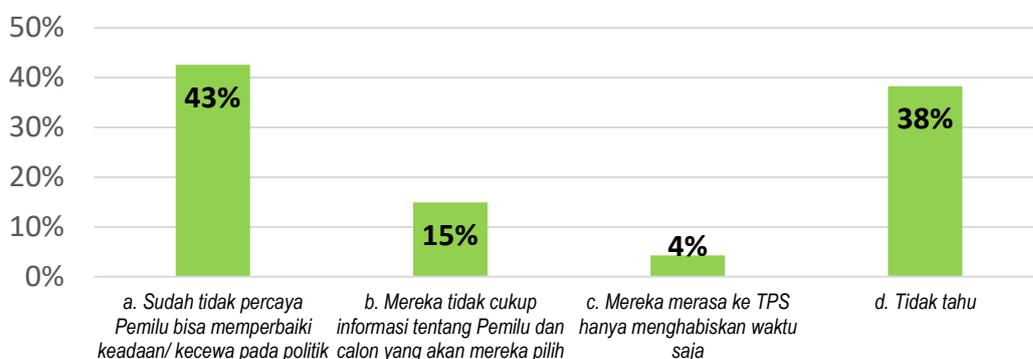


Teori prilaku memilih membahas tiga lokuspreferensi pemilih. Pertama, pemilih berdasarkan pada hubungan sosiologis seperti : etnis, hubungan darah (keluarga), kesamaan budaya, dan seterusnya; kedua, prilaku memilih dari faktor psikologis, yakni preferensi pemilih ditentukan

oleh rasa suka atau tidak suka akan sesuatu. Dalam konteks ini boleh kesukaan/ ketidaksukaan kepada kandidat ataupun kesukaan/ ketidaksukaan kepada partai; dan ketiga, pilihan rasional, yakni preferensi berdasarkan apakah pilihan mereka akan membawa keuntungan kepada mereka, baik secara materi maupun non materi.

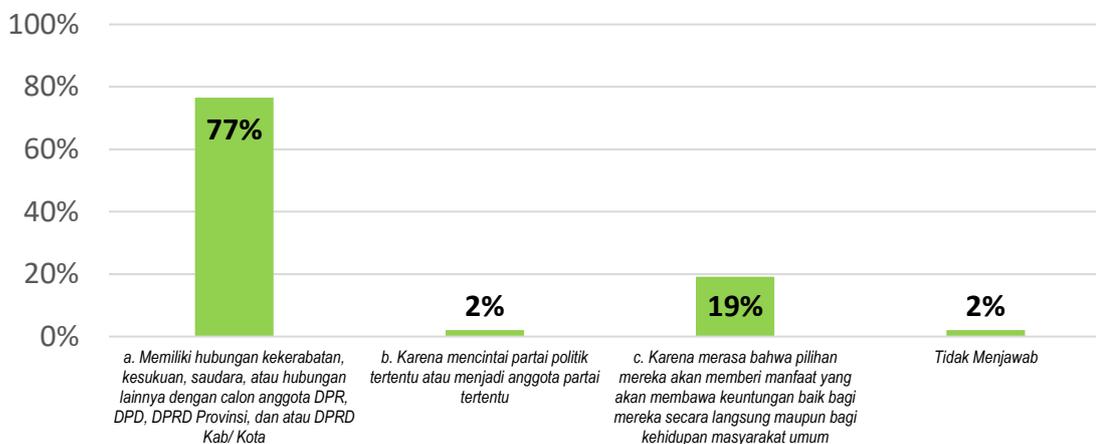
Berdasarkan hasil pada poin 1.7. di atas, terlihat sangat jelas bahwa faktor sosiologislah yang paling memengaruhi perilaku memilih warga Kota Sungai Penuh.

1.8. Faktor utama yang membuat masyarakat kami tidak datang ke TPS karena:



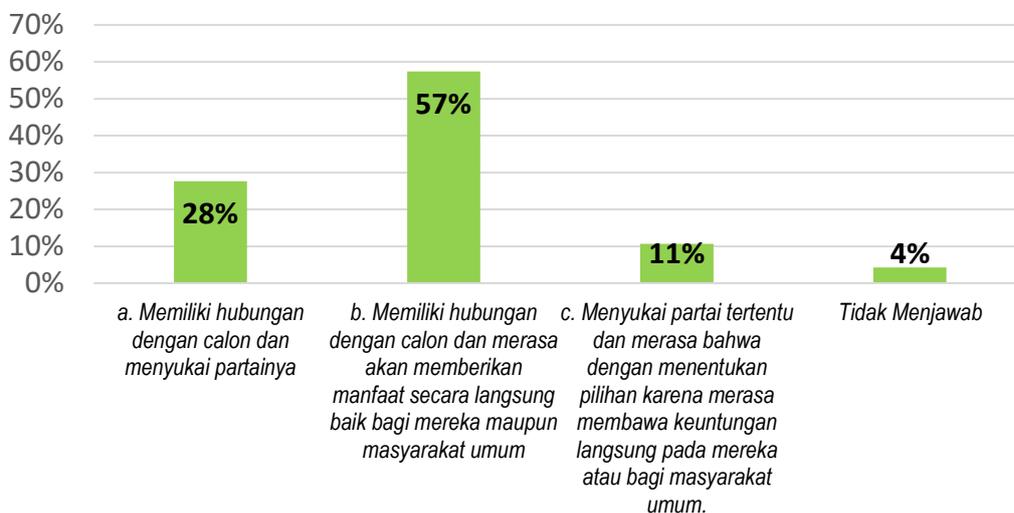
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada poin 1.8. terlihat bahwa ada ketidakpercayaan warga yang tidak datang ke TPS terhadap perbaikan yang bisa dibawa oleh sistem pemilu maupun pilpres. Meskipun angka yang tidak datang ke TPS tidak tinggi, namun sikap apatis warga terhadap sistem politik perlu menjadi perhatian serius, agar warga lebih mengerti bahwa pilihan politik Indonesia saat ini sudah merupakan bagian terbaik dari sistem lain yang pernah ada sebelumnya di Indonesia.

2.1. Pada saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang lalu, saya yakin sebagian besar pemilih menjatuhkan pilihan kepada kandidat tertentu karena:



Sama dengan poin 1.7. di atas. Ini hanya pertanyaan konfirmasi terhadap pertanyaan sebelumnya.

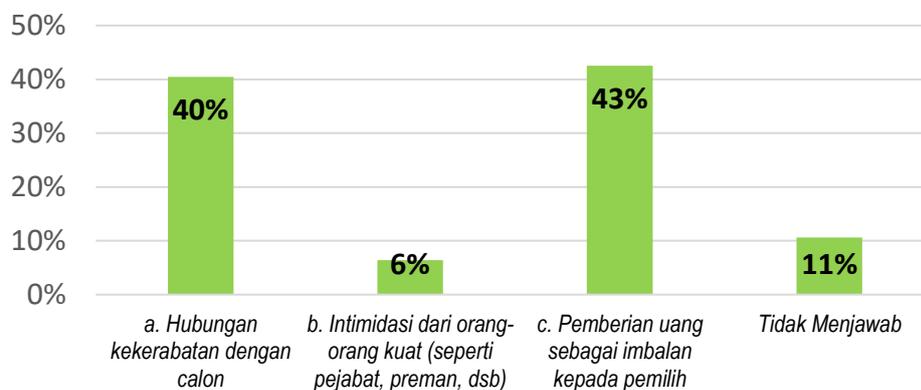
2.2. Jika dikombinasikan alasan memilih pada Pemilu yang lalu, maka alasan orang memilih adalah:



Berdasarkan teori perilaku memilih di atas, jika dikombinasikan alasan memilih warga Kota Sungai Penuh di antara tiga faktor dalam perilaku memilih (sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional), gabungan yang paling berpengaruh adalah antara sosiologis dan pilihan rasional. Jika hubungan sosiologis bisa ditandai dengan ikatan kekerabatan dan suku, maka tidak begitu halnya dengan pilihan rasional yang dimaksud. Pertanyaan 2.3. berikut

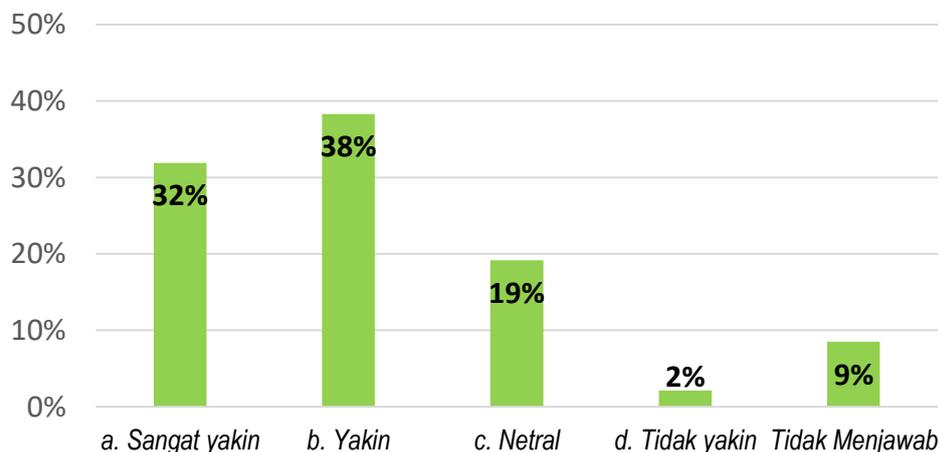
akan memperlihatkan pilihan rasional dalam bentuk apa yang memiliki pengaruh terhadap preferensi pemilih.

1.3. *Pilihan berikut yang paling berpengaruh kepada pilihan pemilih di tingkat grass root adalah:*



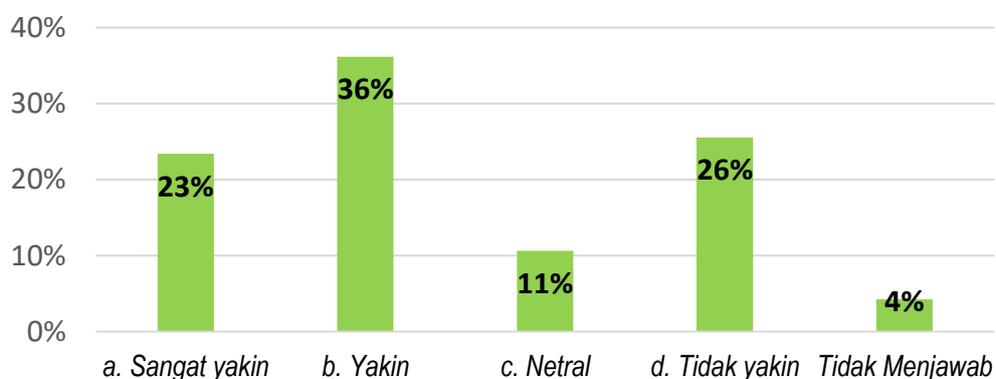
Faktor sosiologis dan pilihan rasional ditandai dengan hubungan kekerabatan dan pemberian uang. Jadi, selain karena faktor kekeluargaan, maka faktor uang memengaruhi dalam preferensi pemilih.

2.4. *Pada pemilihan umum yang lalu, saya meyakini bahwa masyarakat sangat dipengaruhi oleh politik uang:*



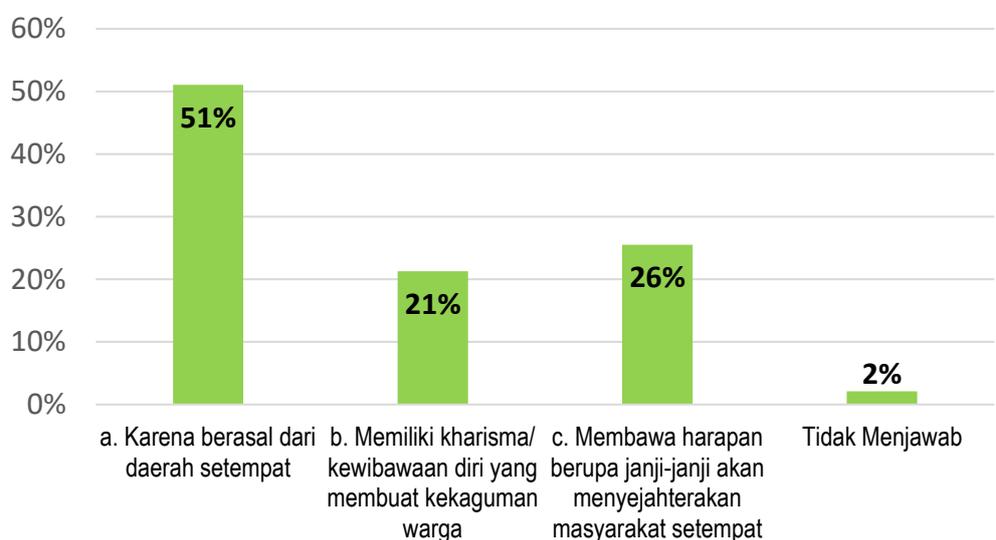
Faktor pemberian uang kembali terkonfirmasi pada pertanyaan 2.4. di atas. Responden menunjukkan angka 70% uang menjadi faktor yang menentukan dalam melakukan pilihan.

2.5. Setelah diberi uang, saya merasa yakin pemilih akan memilih para calon yang memberi mereka uang:



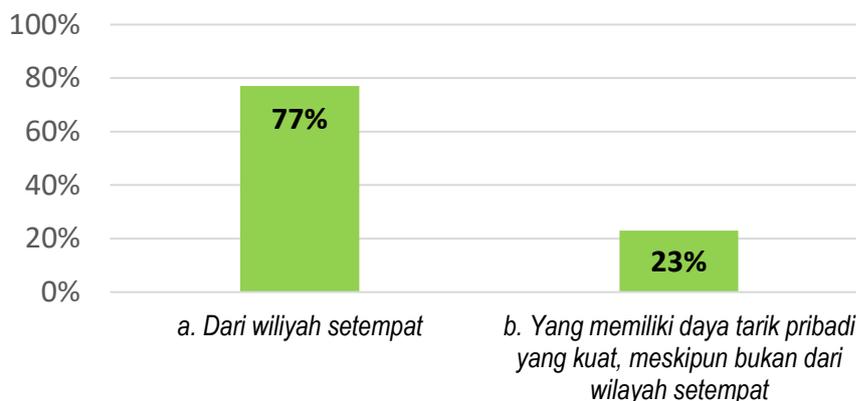
Ada 60% responden yang yakin bahwa setelah diberi uang, maka pemilih akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang memberikan uang. Sebaliknya, hanya 26% pemilih yang yakin bahwa pemberian uang tidak akan berpengaruh kepada preferensi pemilih.

2.6. Kandidat/ calon anggota legislatif di semua tingkatan (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota) pada Pemilu April 2014 yang lalu dipilih karena:



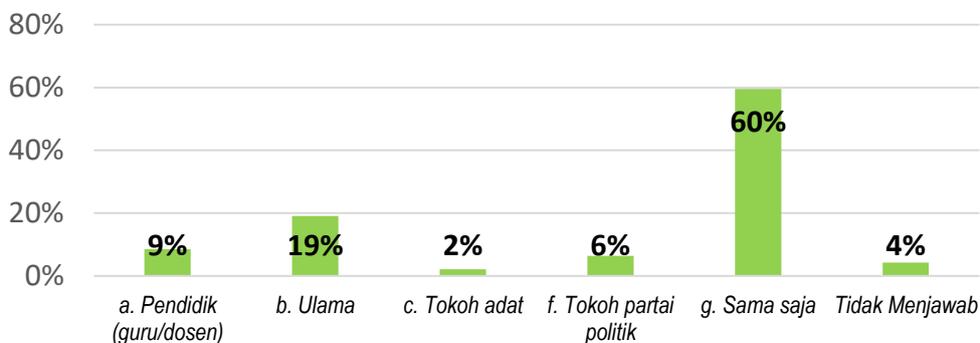
Berdasarkan teori perilaku memilih, poin 2.6. di atas menunjukkan bahwa faktor sosiologis tetap secara konsisten menjadi pertimbangan pilihan pemilih di samping faktor pragmatisme, yakni keuntungan yang diharapkan kepada kandidat jika mereka memilih kandidat yang bersangkutan.

2.7. Pemilih di sini (Sungai Penuh) cenderung memilih kandidat:



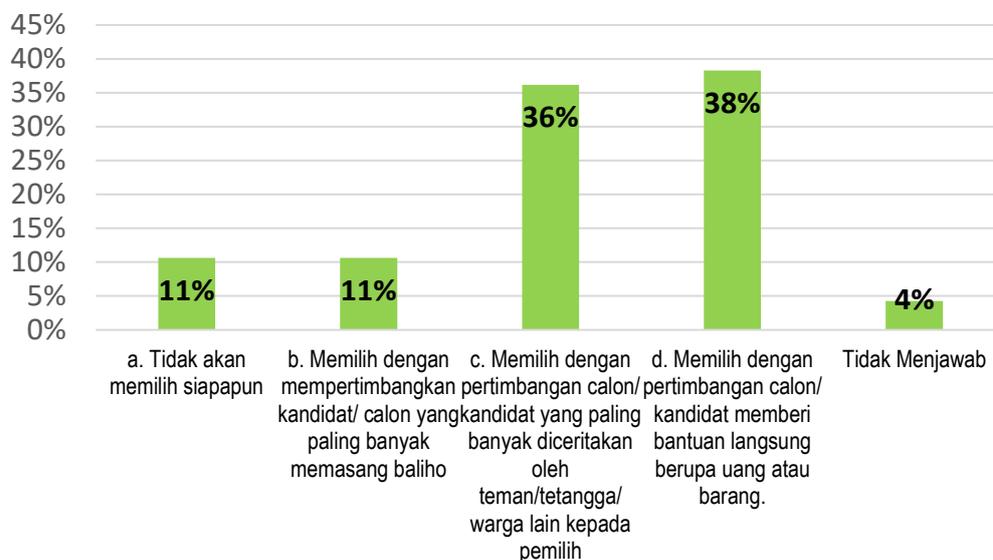
Faktor sosiologis kembali menunjukkan sebagai faktor utama membahas perilaku memilih warga Kota Sungai Penuh. Bahkan personalitas calon tidak menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa teori primordialisme yang dikemukakan Geertz bekerja pada masyarakat Sungai Penuh.

2.8. Berikut adalah profil kandidat yang paling disukai (dari sisi pekerjaan):



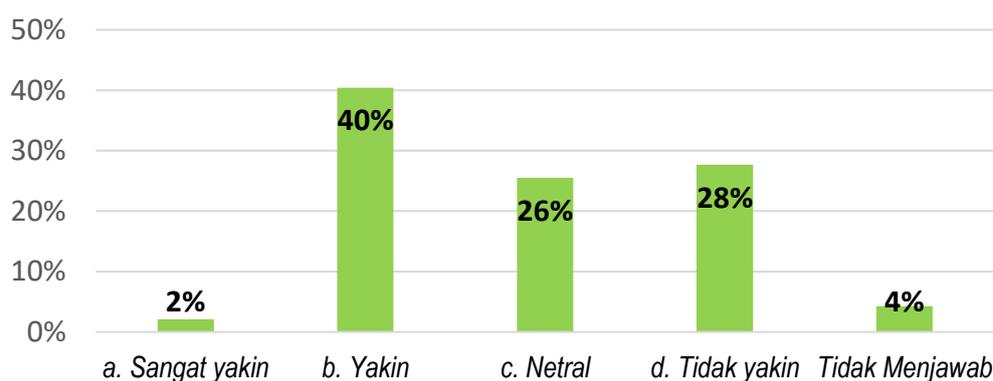
Dari semua profil yang ditawarkan kepada pemilih, tidak ada yang dominan sebagai sebuah pilihan, kecuali yang sedikit mencolok adalah faktor agama. Masyarakat Kota Sungai Penuh yang dikenal cukup religius, memberikan harapan kepada “ulama” untuk bisa tampil sebagai kandidat yang akan mereka pilih.

2.9. Jika tidak ada satupun calon yang dikenal secara langsung oleh masyarakat, maka masyarakat akan:



Faktor lain yang menjadi pertimbangan pemilih di Kota Sungai Penuh adalah para calon yang diceritakan oleh orang lain kepada mereka dan calon yang memberi keuntungan materi secara langsung, meskipun mereka tidak kenal calon yang akan mereka pilih. Hal ini menunjukkan pengaruh jaringan tim kampanye dan pemberian uang atau materi dalam bentuk lain akan berpengaruh kepada pemilih.

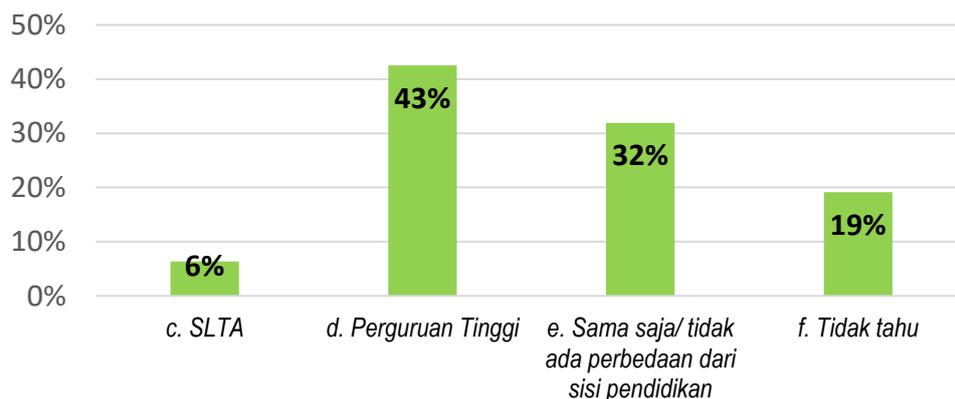
2.10. Menurut Anda, apakah dalam menentukan pilihannya, para pemilih yakin akan komitmen kandidat/ calon terhadap mereka



Pemilih di Kota Sungai Penuh menunjukkan keyakinan yang cukup tinggi kepada kandidat yang mereka pilih, yakni ada 42% yang cukup yakin bahwa kandidat yang mereka pilih akan membawa perbaikan sebagaimana yang kandidat janjikan. Meskipun demikian, tidak sedikit pemilih yang ragu bahwa warga Kota Sungai Penuh benar-benar memilih sesuai dengan nurani

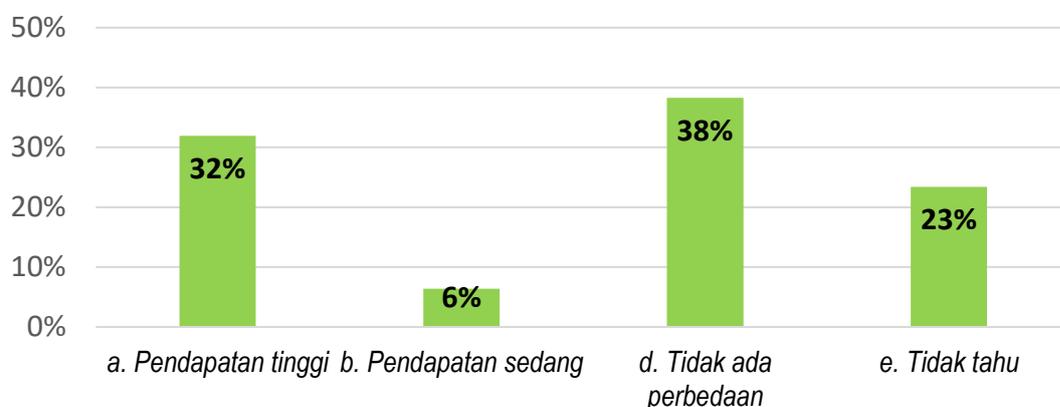
mereka. Kelompok ini berjumlah 28%, dan barangkali bisa bertambah jika digabungkan dengan kelompok yang menyatakan netral dan tidak memberi jawaban yang jumlahnya 26% + 4%.

2.11. *Jika diurutkan dari tingkat pendidikan, maka urutan mereka yang mempertimbangkan pilihan karena kemampuan para calon adalah*



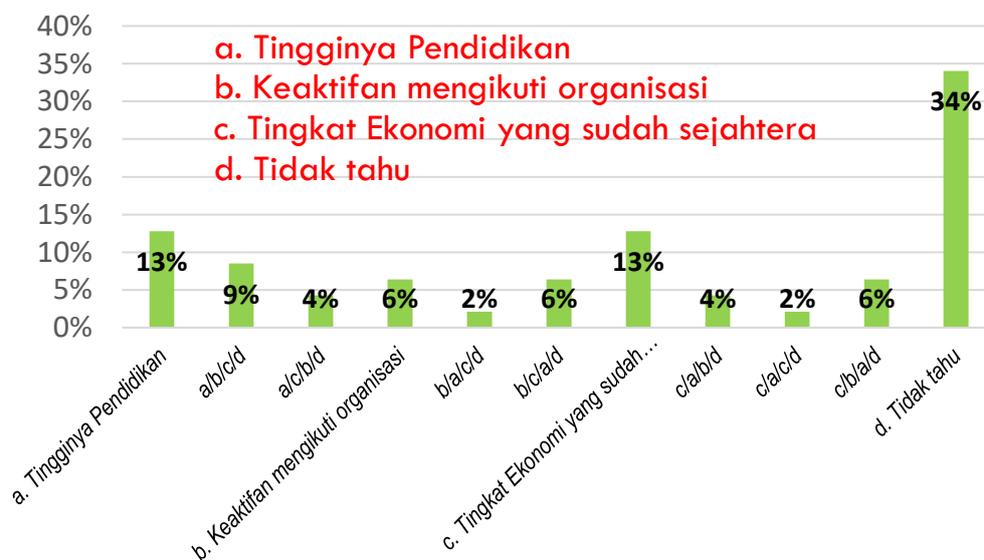
Pemilih di Kota Sungai Penuh, yakin bahwa semakin tinggi pendidikan para pemilih, maka dalam menentukan pilihan mereka akan semakin selektif, terutama dalam kemampuan kandidat. Angka menunjukkan bahwa ada 43% yakin bahwa tamatan perguruan tinggi bisa memilih dengan baik, meskipun ada cukup banyak pemilih yang ragu yang menyatakan bahwa sama saja perilaku pemilih ditinjau dari tingkat pendidikan.

2.12. *Jika dilihat dari tingkat pendapatan, maka mereka yang memilih berdasarkan kompetensi para calonnya adalah:*



Mirip dengan tingkat pendidikan di atas, pemilih juga yakin, semakin sejahtera (ekonomi), maka mereka akan cenderung memilih kandidat yang lebih berkompeten.

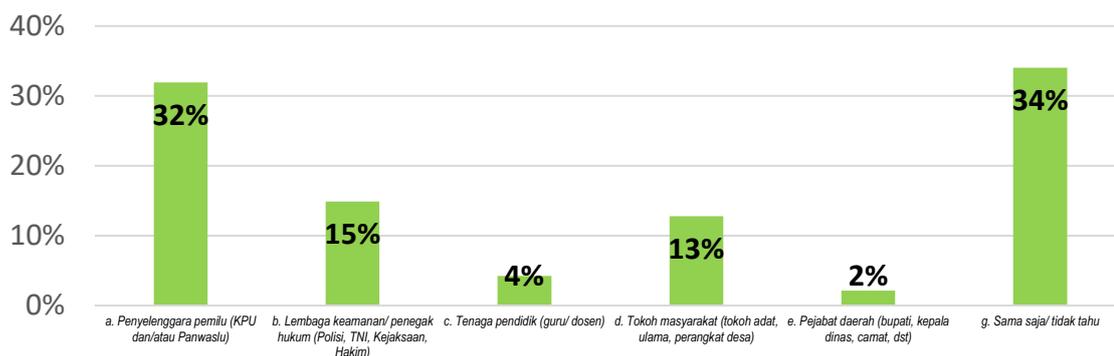
2.13. (urutkan mulai dari yang paling utama [1], [2], dst) Jika diurutkan, maka yang paling utama membentuk perilaku memilih yang rasional adalah:



Hasil dari pertanyaan 2.13. di atas mengonfirmasi pertanyaan pada poin 2.11. dan 2.12. sebelumnya. Pemilih menunjukkan keyakinan, di antara faktor lain, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi menempati posisi cukup tinggi jika dibandingkan dengan faktor lain dalam menentukan pilihan.

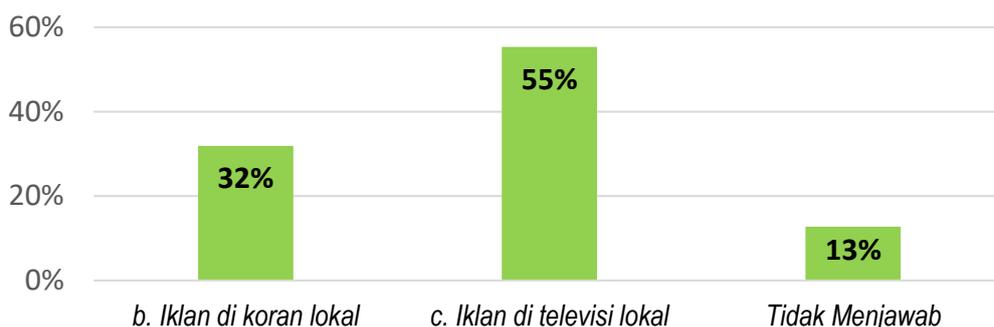
c. Peran Stake Holder dan Media

3.1. *Himbauan kepada masyarakat agar memilih calon/ kandidat yang baik akan efektif jika dilakukan oleh:*



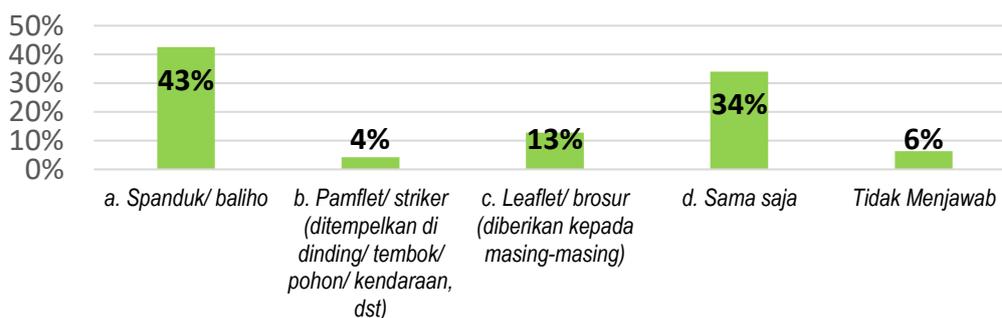
Poin 3.1. di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih cukup percaya kepada lembaga KPU dan/ atau Panwaslu untuk tetap melakukan himbuan kepada warga agar ikut berpartisipasi aktif dalam politik.

3.2. Iklan himbuan kepada masyarakat agar memilih calon yang baik untuk masa depan bangsa lebih efektif melalui:



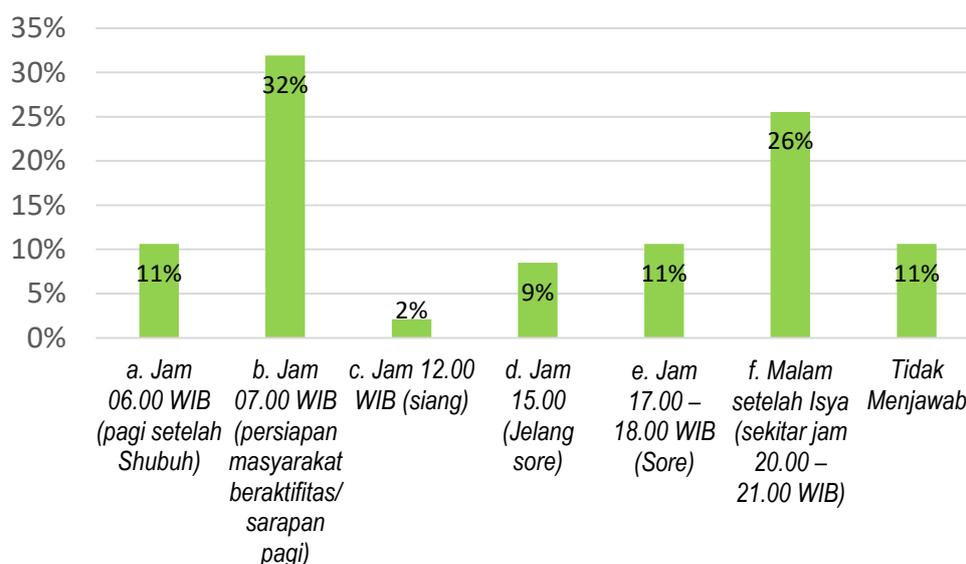
Keberadaan TV Lokal (Sungai Penuh TV) sepertinya cukup penting dalam memengaruhi warga Kota Sungai Penuh dalam bidang politik. Dibanding dengan media koran, TV lokal akan membawa pengaruh lebih signifikan kepada para pemilih.

3.3. Berikut media yang paling efektif menjadi sarana penyampai pesan agar pemilih menetapkan pilihan pada kandidat yang baik adalah:



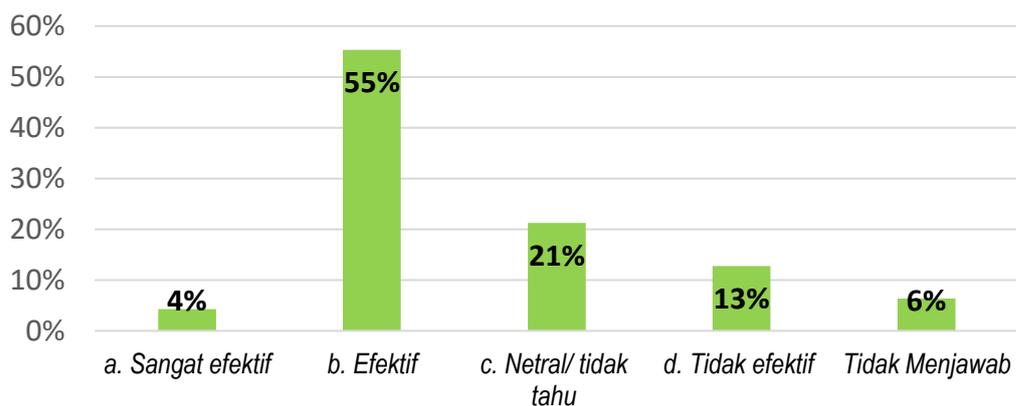
Jika dalam bentuk baliho, spanduk, leaflet, dan sejenisnya, spanduk atau baliho menjadi salah satu yang menjadi alat exposure kandidat. Keberadaan spanduk ini barangkali karena bisa menjangkau zona yang luas dan biasanya terpasang di tempat strategis.

3.4. Jika ada pengumuman dari masjid/ mushalla untuk memilih pemilih yang baik/ berkompeten, maka waktu yang paling tepat adalah:



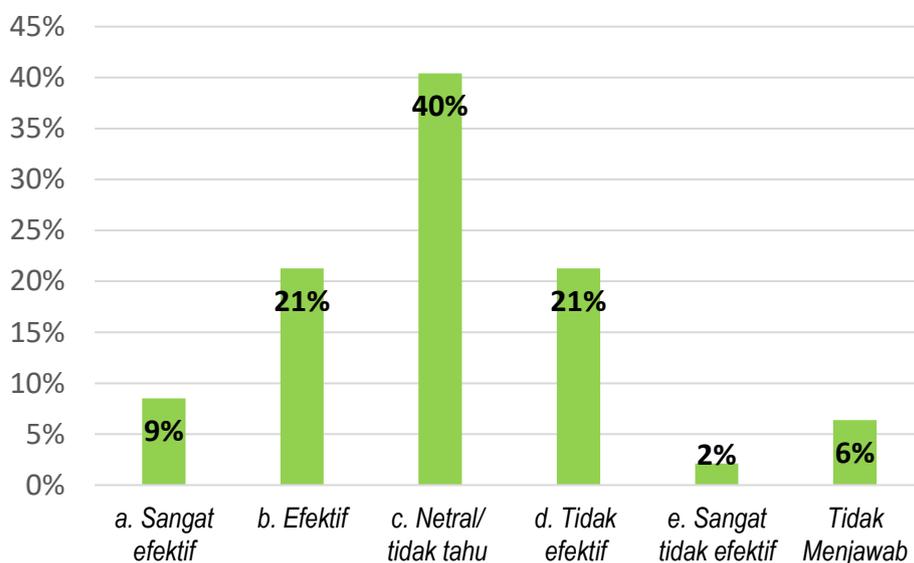
Jawaban terhadap pertanyaan 3.4. menunjukkan bahwa warga Kota Sungai Penuh lebih nyaman jika pengumuman massal yang disampaikan lebih efektif jika dilakukan ketika pada pagi hari sebelum mereka beraktifitas, atau pada malam hari setelah mereka selesai beraktifitas. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pendakwah untuk menentukan bagaimana pola penyampaian pengumuman massal lebih tepat dilakukan terhadap warga Kota Sungai Penuh.

3.5. Apakah himbauan untuk memilih calon berkompeten melalui kegiatan-kegiatan keagamaan (shalat Jum'at, perayaan hari besar Islam, majelis ta'lim, dst) efektif dalam memengaruhi pemilih yang hadir:



Jawaban terhadap pertanyaan 3.5. menunjukkan bahwa warga Kota Sungai Penuh merasa cukup yakin bahwa himbauan atau sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat pada kegiatan-kegiatan penting memberi pengaruh cukup tinggi terhadap preferensi pemilih.

3.6. *Apakah himbauan guru dan / atau dosen mengajak siswa/ mahasiswa di sekolah/ kampus akan efektif membuat mereka memilih calon/ kandidat yang berkompeten:*



Jika himbauan itu dilakukan di sekolah atau di kampus, responden tidak menunjukkan ada pengaruh yang besar. Namun demikian, sekitar 30% yang merasa cukup yakin, tetap bisa memberi peluang kepada pihak sekolah atau pihak kampus untuk memberikan informasi politik kepada para siswa dan atau mahasiswa.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan baik dari data berupa dokumen Pemilu, wawancara tatap muka dengan responden terpilih, serta FGD, berikut beberapa temuan penting yang menjadi catatan perihal perilaku pemilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh :

1. Secara keseluruhan, tidak terlihat ada masalah dalam hal kesukarelaan memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam politik. Ada antusiasme yang relatif tinggi dalam politik. Sebagai contoh, berdasarkan keterangan dari komisioner KPU, baik Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, dan beberapa nara sumber yang diminta memberi pendapat, menunjukkan angka partisipasi peserta yang ingin menjadi penyelenggara pemilihan umum di Kerinci sangat tinggi. Di sisi lain, antusiasme ini kadang salah digunakan. Di antara yang terungkap dalam sesi FGD, tidak sedikit warga yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
2. Dalam hal menjadi penyelenggara atau ikut aktif menjadi tim kampanye (tim sukses, atau sebutan sejenis), terlihat bahwa warga Kerinci memiliki kecenderungan bisa terlibat aktif.
3. Warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memiliki kepedulian yang cukup tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Termasuk di dalam kegiatan pemerintahan itu adalah kegiatan politik.
4. Keterlibatan tokoh setempat dalam mengajak warga untuk berpartisipasi dalam politik memperoleh respon yang cukup tinggi. Artinya, meskipun antusiasme terhadap politik sudah cukup baik, dengan ajakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, akan bisa menambah antusiasme tersebut.
5. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya beralasan bahwa kegiatan politik sudah tidak memiliki pengaruh banyak dalam memperbaiki nasib mereka.

6. Faktor sosiologis (kekerabatan, hubungan keluarga, atau wilayah) menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pilihan.
7. Meskipun faktor sosiologis ini berpengaruh, tidak bisa dipastikan level keterikatan pemilih atas dasar sosiologis ini, dengan kata lain bahwa tingkat fanatisme pada kekerabatan dalam menentukan pilihan ini tidak kelihatan secara tegas, karena di sisi lain, pengaruh politik uang juga kelihatannya masih cukup tinggi.
8. Berkenaan dengan turunnya partisipasi pemilih pada Pilpres, 34% responden meyakini bahwa ada perbedaan sosialisasi antara Pileg dan Pilpres. Sosialisasi itu boleh saja berhubungan dengan kandidat dan tim pemenangannya. Namun, khusus untuk KPU bisa dilihat dari sisi strategi sosialisasi di antara dua hal ini.
9. Meskipun faktor sosiologis ini berpengaruh, tidak bisa dipastikan level keterikatan pemilih atas dasar sosiologis ini, dengan kata lain bahwa tingkat fanatisme pada kekerabatan dalam menentukan pilihan ini tidak kelihatan secara tegas, karena di sisi lain, pengaruh politik uang juga memiliki pengaruh cukup signifikan dalam menentukan pilihan.
10. Terlihat cukup jelas, meskipun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sedikit, namun alasan mereka yang sudah tidak bisa percaya pada sistem politik yang ada, dikhawatirkan memiliki dampak besar dalam memengaruhi pemilih lain untuk tidak berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, materi sosialisasi politik perlu diperluas dengan memasukkan unsur yang bisa meyakinkan pemilih bahwa politik adalah satu entitas utama yang bisa berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Penggunaan media berupa pengumuman massal, seperti di masjid atau mushallah memberi pengaruh dalam partisipasi politik warga. Di samping itu, pengumuman massal tersebut perlu mempertimbangkan waktu.
12. Terlihat pengaruh politik uang cukup tinggi. Meskipun sulit dideteksi dan dibatasi. Pengaruh uang terhadap pemilih sampai pada angka 60%. Angka

ini cukup tinggi, mengingat penentuan pemenang dalam kontestasi politik.

13. Kegiatan yang melibatkan warga dalam jumlah yang banyak seperti acara-acara keagamaan, atau acara lain sejenis bisa dijadikan sebagai sarana untuk memberi pembelajaran kepada pemilih agar mereka memberi pilihan kepada kandidat yang berkompeten, sehingga mereka bisa menerima hasil maksimal dari pilihan yang mereka lakukan.
14. Yang cukup penting dari semua hal yang disajikan di atas, para responden meyakini bahwa pemanfaatan media tempat ibadah, acara-acara keagamaan, bisa menjadi salah satu wadah yang efektif guna member pendidikan politik bagi pemilih agar pilihan yang mereka berikan lebih baik. Tidak dipertimbangkan oleh kedekatan sosiologis semata, apalagi oleh pertimbangan keuntungan materi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Era Reformasi di Indonesia yang sudah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun, telah menimbulkan dampak signifikan bagi kehidupan politik di Indonesia. Era politik sentralistik yang dipraktikkan oleh pemerintah Orde Baru, di bawah kendali Soeharto dari tahun 1966, perlahan berakhir pada tahun 1998. Politik Indonesia sejak saat itu, praktis berubah, yang salah satu dampak yang paling terasa adalah terlibatnya warga secara langsung dalam banyak model pemilihan politik yang tidak pernah ditemui sebelumnya. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi salah satu pintu utama menuju pada terlibatnya warga dalam pemilihan langsung.

Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, keterlibatan langsung warga dalam setiap pemilihan politik telah membawa perubahan besar. Tidak saja bagi meningkatnya partisipasi warga secara langsung dalam politik, namun juga beberapa eksekutif negatif terhadap perilaku memilih warga. Di antara yang paling menonjol adalah pola pilihan yang sangat dipengaruhi oleh unsur primordialisme dan penggunaan uang sebagai imbalan dalam pemilihan.

Perilaku politik warga dalam melakukan pilihan seperti yang tersebut di atas, alih-alih mendukung berkembangnya demokrasi ke arah yang lebih baik, justru menghancurkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh demokrasi. Sehingga perlu upaya yang cukup serius untuk mengantisipasi berkembangnya perilaku politik yang telah berkembang, paling tidak sejak proses pemilihan langsung, tahun 2004, dimulai.

Namun, di tengah-tengah masalah yang ditemui di atas, tetap ada peluang bagi pihak yang ingin memperbaiki kualitas perilaku memilih warga. Responden meyakini bahwa himbauan para tokoh masyarakat di masing-masing daerah tetap bisa memberi pengaruh positif bagi perilaku memilih warga. Bahkan, media komunikasi melalui tempat-tempat ibadah dan acara-acara keagamaan dianggap

efektif untuk memperbaiki perilaku memilih warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

B. Rekomendasi

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa diajukan guna memberi pertimbangan bagi upaya meningkatkan kualitas perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

1. Perlu dilakukan upaya yang cukup serius dalam mendata warga agar tidak terjadi pemilih ganda. Hal ini bisa dengan mencocokkan data pemilih dari daerah tertentu yang menetap secara tidak permanen di tempat lain, baik karena memiliki kebun/ ladang, maupun karena ada kegiatan lainnya. Misal dari Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Air Hangat Timur. Ada banyak warga Air Hangat Timur yang memiliki kebun/ ladang/ tempat usaha di Kecamatan Bukit Kerman. Hal serupa juga terjadi dengan warga di Kecamatan Siulak dengan Kayu Aro. Ada banyak warga Siulak yang memiliki ladang di Kayu Aro yang boleh jadi terdaftar lebih dari satu kali. Untuk untuk pendataan pemilih *by name* perlu dilengkapi dengan identifikasi nomor induk kependudukan, atau kode lain yang memastikan bahwa pemilih tidak bisa terdaftar lebih dari satu kali;
2. Meskipun warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah cukup antusias dalam mengikuti kegiatan politik, ajakan tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh cukup tinggi dalam memantapkan keikutsertaan masyarakat Kerinci dalam politik. Ajakan tersebut, berdasarkan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Kerinci bisa saja dilakukan dalam pengajian-pengajian rutin warga; pengumuman melalui corong mushalla dan masjid. Sebaiknya intensitas pengumuman dalam mengajak warga ditingkatkan, terutama menjelang kegiatan pemilihan;
3. Perlu kewaspadaan terhadap pemilih apatis. Terlihat cukup jelas, meskipun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sedikit, namun alasan mereka yang sudah tidak bisa percaya pada rezim politik,

dikhawatirkan memiliki dampak besar dalam memengaruhi pemilih lain untuk tidak berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, materi sosialisasi politik perlu diperluas dengan memasukkan unsur yang bisa meyakinkan pemilih bahwa politik adalah satu entitas utama yang bisa berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. Perlu kewaspadaan cukup tinggi dalam membatasi politik uang. Meskipun sulit dideteksi dan dibatasi, politik uang bisa saja diminimalisir eksekusinya dengan memberi pertimbangan logis agar pemilih tetap mengedepankan rasionalitas sebagai pertimbangan dalam melakukan pilihan.
5. Media dakwah melalui acara-acara keagamaan serta pemanfaatan tempat ibadah bisa menjadi wadah efektif dalam meningkatkan kualitas perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Demikian laporan hasil penelitian ini, semoga bisa menjadi sumber informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh khususnya, dan warga Negara Republik Indonesia pada umumnya.

ⁱMasa politik transisi ini, paling tidak masih berlangsung sampai cukup lama. Bahkan sampai tahun 2006, ketika Valina Singka menulis disertasi tentang Perubahan Undang-undang pada Masa Transisi, terma transisi masih digunakan. Lihat Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 17

ⁱⁱ Baharudin Jusuf Habibie, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, : Jakarta : Pustaka Gramedia Utama, 2005, hal. 103-145

ⁱⁱⁱ Lihat Yasar Amir Piliang (kata pengantar) dalam Arief Adityawan S, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2008, hal. xxiii. Penjelasan mengenai kondisi perekonomian Indonesia kala itu bisa dilihat pada website Bappenas www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9663/1792/diakses pada 09 Desember 2014

^{iv} Beberapa artikel hasil penelitian yang tergabung dalam buku Henk Sculte Nordholt Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, menunjukkan bahwa upaya kelompok etnik pada masing-masing daerah untuk berkuasa ditunjukkan dengan nyata dan terbuka, tanpa rasa khawatir seperti pada Era Orde Baru.

^v<http://www.labsosiologiunj.org/wp-content/uploads/2012/10/Kurikulum-sebagai-Arena-Kontestasi-Kekuasaan.pdf>

^{vi} March Hooghe, *Budaya Politik, dalam* John T. Isiyama dan Marijke Breuning, *op.cit.* hal. 337-338, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal:48-51. Keterangan serupa juga bisa ditemukan dalam

^{vii} Ibid. hal.338

^{viii} <http://www.alhikmah.co.id/menjadi-politisi-dakwah/> dikases pada tanggal 15 Agustus 2015.

^{ix} Ibid.

^x Lihat B.C. Smith, *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*, Manchester : Allen & Unwin Inc. 1985, hal 1.

^{xi} Lihat Fadilla Putra, *Devolusi: Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 6.

^{xii} Dennis A. Rondinelli and G. Shabbir Shema, *Decentralization, Development and Directions*, Ch. 10. Sage Publication, Beverly Hills, California, hal. 305.

^{xiii} John Stewart, *Democracy and Local Government*, in Paul Hirt and Sunil Khilnani (eds), *Reinventing Democracy*, Oxford, Blackwell Publishers, 1996, hal. 39.

^{xiv} Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1995, hal. 28.

^{xv} Clifford Geertz (eds), *Old Societies and New State: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York, The Free Press, 1963, page.130

^{xvi} Lihat Clifford Geertz, *Old Societies and New State* yang diterjemahkan dalam *Ikatan-ikatan Primordial dan Politik di Negara-negara Baru* dalam Juwono Sudarsono (ed), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981, hal 1-14. Lihat juga Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta, Dirjen Dikti Depdiknas, 2000, hal 119.

^{xvii} Nilai-nilai *given* adalah nilai-nilai yang telah terbentuk dan diterima oleh individu apa adanya atau campur tangan individu yang bersangkutan sehingga bersifat alami. (lihat Geertz,1963:109-110; Sudarsono, 1981:3).

^{xviii} Istilah etnik (*ethnic*) diperkenalkan sejak abad ke-14. Istilah etnisitas dan kelompok etnik berasal dari kata Yunani *ethnos*, diterjemahkan sebagai bangsa, dalam arti yang lebih modern muncul pada pertengahan abad ke-19 dan mengekspresikan gagasan orang atau negara. Lihat Thi E Tonkin, M. McDonald and M. Chapman, *History and Ethnicity* (London, 1989:11-17); J. Hutchinson & A.D. Smith (eds), *Oxford Readers: Ethnicity* (Oxford, 1996:18-24). Di Inggris misalnya, pada tahun 1977, Wallman mencatat bahwa etnik lebih populer dengan ras, hanya menurut mereka kurang tepat, dan dengan nilai beban lebih ringan. Sebaliknya di Amerika Utara, ras paling sering digunakan yang berarti warna, dan suku. Suku mengandung pengertian keturunan imigran baru dari negara-negara non berbahasa Inggris. Sedangkan di Inggris tidak ada istilah suku, yang ada hanya hubungan etnik. (lihat Wallman S, *Ethnicity Research in Britain*, *Current Anthropology*, Vol. 18, no. 33, 1977, hal. 531-532).

^{xix} Lihat juga M.D. La Ode, *Etnik Cina di Era Reformasi, Studi Kasus Keterlibatan Etnik Cina di Indonesia dalam Politik di Kota Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat 1998-2008*, Jakarta, FISIP UI (Disertasi, tidak diterbitkan), 2011, hal. 9-10.

^{xx} Kelompok etnik menurut Don Handelman sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilar (2007:05) adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau memiliki satu nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen yang simbolik, seperti keluarga, ciri-ciri fisik, afiliasi agama dan kepercayaan, bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut di atas. Pada dasarnya di dalam kelompok tersebut terdapat ikatan antar anggota sebagai suatu kelompok.

^{xxi} Penjelasan mengenai dakwah ini sebagian besar dikutip dari website <http://www.alhikmah-co.id> dengan mengedit beberapa hal yang dianggap perlu

^{xxii} Definisi masyarakat pendatang ini tidak bisa diartikan secara harfiah, sebab sesungguhnya warga minang yang ada di Kerinci adalah bagian dari konsekwensi Kabupaten Kerinci sebelum tahun 1957 merupakan salah satu bagian dari Sumatera Barat.

^{xxiii} Kuisisioner terdapat dalam lampiran.

^{xxiv} Data diakses dari <http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpsungaipenuh/profil-kota-sungai-penuh-dan-kabupaten-kerinci-jambi>, 26 September 2014

^{xxv} Diakses dari situs <http://www.incung.com/2014/11/sekilas-perjuangan-pembentukan.html>

^{xxvi} Sumber dari karya ilmiah dengan judul Otonomi Daerah Sungai Penuh

^{xxvii} Nilai-nilai *given* adalah nilai-nilai yang telah terbentuk dan diterima oleh individu apa adanya atau campur tangan individu yang bersangkutan sehingga bersifat alami. (lihat Geertz,1963:109-110; Sudarsono, 1981:3).